

SINERGI

BULETIN BPIW



Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR



www.bpiw.pu.go.id



Edisi 24/ Desember 2017

Kaleidoskop 2017

Capaian BPIW 2015-2017

Memaksimalkan Dukungan Perencanaan Infrastruktur
PUPR Terhadap Program Prioritas Nasional



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR**

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI

Gedung BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: humasbpiw@gmail.com

Telp. +6221-2751 5804



www.bpiw.pu.go.id



[@informasiBPIW](https://twitter.com/informasiBPIW)



[@informasiBPIW](https://www.instagram.com/informasiBPIW)



[Layanan Informasi BPIW](#)



[BPIWkementerianPUPR](#)

SINERGI

BULETIN BPIW

Pelindung:

Rido Matari Ichwan

Penasehat:

Firman Hatorangan

Pengarah:

Bobby Prabowo
Iwan Nurwanto
Hadi Suahyono
Agusta Ersada Sinulingga

Pemimpin Redaksi:

P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana:

Shoviah

Redaksi:

M. Salahudin Rasyidi
Mochammad Tranggono
Hari Suharto Diyaksa
Erwin Adhi Setyadi
Wahyu Hendrastomo
Melva Eryani Ma rpaung

Editor :

Hendra Djamal

Kontributor:

Mutri Batul Aini
Indira Dwi Kusumatuti
Daris Anugrah
Andhika Prabowo

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:

Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
humasbpiw@pu.go.id
Website: www.bpiw.pu.go.id

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com

Design : Heri Hito

SALAM REDAKSI

.....

Pembaca yang budiman, Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hadir kembali dengan informasi-informasi menarik.

Pada edisi akhir tahun ini, Sinergi tampil berbeda dengan rubrik pada bulan-bulan sebelumnya, dimana ditampilkan Kaleidoskop 2017 yang memaparkan kilas balik kegiatan BPIW mulai dari Januari hingga Desember.

Untuk rubrik Kabar Utama tetap hadir yang secara mendalam mengulas Refleksi Akhir Tahun 2017. Selain itu dihadirkan rubrik baru yakni Selayang Pandang. Rubrik ini berisi testimoni tentang BPIW dari beberapa kalangan, baik internal Kementerian PUPR maupun kalangan eksternal seperti akademisi maupun asosiasi.

Edisi kali ini Sinergi juga menampilkan Capaian BPIW selama 3 tahun berkisah di Kementerian PUPR, yakni 2015 hingga 2017.

Kami berharap apa yang disajikan Sinergi edisi akhir tahun 2017 dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.

04



01 SALAM REDAKSI

02 DAFTAR ISI

03 PERSPEKTIF

BPIW Jawab Kepercayaan Pemerintah dengan Kerja Maksimal

04 KABAR UTAMA

Memaksimalkan Dukungan Perencanaan Infrastruktur PUPR Terhadap Program Prioritas Nasional

10 KALEIDOSKOP 2017

Kilas Januari - Desember 2017

54 CAPAIAN BPIW

11 Capaian BPIW 2015 - 2017

66 POTRET

Upacara Bendera Memperingati Hari Bakti PU ke-72 Dengan Balutan Busana Daerah

68 SELAYANG PANDANG

Kata Mereka Tentang Kiprah BPIW

54



66



BPIW Jawab Kepercayaan Pemerintah dengan Kerja Maksimal

Tahun 2017, merupakan tahun ke-3 bagi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang tertuang didalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri tersebut mengatur tugas dan fungsi BPIW. Dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 ini, BPIW memfokuskan kegiatannya pada penyiapan penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* untuk 3 lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan mekanisme pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Tiga lokasi KSPN tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, dan kawasan Lombok.

Sejak berdiri pada tahun 2015, BPIW merupakan lembaga yang khusus menangani perencanaan infrastruktur sektor PUPR. Namun kini, BPIW diberi kepercayaan untuk menangani *Integrated Tourism Masterplan* atau rencana induk pariwisata yang terintegrasi. Dengan demikian, BPIW tidak hanya menangani perencanaan Kementerian PUPR, tapi juga mengintegrasikan rencana induk pengembangan pariwisata di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebut dari berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Pariwisata, Perhubungan dan Bappenas.

Tugas ini tentunya bukan tugas yang ringan, karena harus dilakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait. Meski bukan menjadi tugas dan fungsi BPIW, namun tugas tersebut tetap dijalankan secara maksimal. Pasalnya program itu merupakan salah satu program prioritas nasional, dimana pada tahun 2019 diharapkan kunjungan wisatawan mancanegara dapat mencapai 20 juta jiwa.

Selain itu BPIW juga masih mempersiapkan Anjungan Cerdas, dimana Anjungan Cerdas yang saat ini dibangun di Bendungan Tugu Jawa Timur dan Jembrana, Bali merupakan *rest area* yang berada di jalan nasional. Selain menyediakan sarana dan prasaran seperti tempat pengisian bahan bakar, rumah makan, toilet dan tempat parkir, didalam Anjungan Cerdas juga disediakan tempat untuk pemasaran produk lokal.

Dengan demikian, Anjungan Cerdas juga berfungsi untuk mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW telah menyusun *masterplan* dan *development plan* infrastruktur PUPR terpadu Kawasan Pelabuhan Patimban. Kemudian juga telah dibuat *masterplan* dan *development plan* 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) termasuk WPS yang ke-35, yakni Pulau-Pulau Terluar.

Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Nawa Cita yakni membangun dari pinggiran. Kawasan diluar WPS juga menjadi perhatian BPIW, demikian juga kawasan perbatasan. Kemudian juga telah dilakukan penajaman *masterplan* dan *development plan* WPS. Sinkronisasi dan keterpaduan program perencanaan juga dilakukan BPIW dengan unit organisasi (unor) Kementerian

PUPR yang melaksanakan pembangunan fisik yakni Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Perumahan. Sinkronisasi dan keterpaduan program juga dilakukan dengan unor Kementerian PUPR yang berada di daerah dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kegiatan yang membahas rencana pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2018 tersebut dilakukan dalam bentuk Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan Konreg. Tahun 2017 Pra Konreg dilakukan di Palembang, Surabaya, Kupang, dan Manado. Sedangkan Konreg dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR.

BPIW juga telah menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Pembangunan Infrastruktur PUPR. Rapat tersebut dilakukan untuk melakukan sinkronisasi perencanaan dengan kementerian lain terkait program prioritas nasional. Kegiatan itu dilakukan dengan harapan perencanaan dan program yang dihasilkan dapat bersinergi dan implementatif dalam menjawab kebutuhan dukungan infrastruktur PUPR dalam program prioritas nasional.

Selain itu dilakukan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 Pembangunan Infrastruktur PUPR Wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara.

Dengan demikian pada tahun 2017, BPIW tidak hanya menghasilkan produk-produk yang menjadi tugas dan fungsinya, tapi juga melakukan sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur baik dengan eksternal tapi juga internal Kementerian PUPR. Hal ini dilakukan, tak lain untuk mencapai percepatan pembangunan infrastruktur sektor PUPR maupun dukungan terhadap program prioritas nasional. **



Memaksimalkan Dukungan Perencanaan Infrastruktur PUPR Terhadap Program Prioritas Nasional

Sepanjang tahun 2017, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPIW melakukan keterpaduan dan sinkronisasi program dengan berbagai pihak, baik internal Kementerian PUPR, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah. Hal itu dilakukan, mengingat BPIW juga dipercaya pemerintah untuk mengawal pelaksanaan integrated tourism masterplan di 3 lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Menjawab kepercayaan tersebut, BPIW akan memaksimalkan program-program yang mendukung program prioritas nasional, termasuk pengembangan pariwisata nasional.



Bendungan Gerak Sembayat Jawa Timur

Sumber: Dok. PUPR



Jembatan Gantung Ranca Wiru Banten

Sumber: Dok. PUPR

Dalam melaksanakan kegiatannya, BPIW Kementerian PUPR mendasarkan pada tugas dan fungsinya yang terdapat didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan berlandaskan tugas dan fungsi tersebut, BPIW melaksanakan berbagai macam program melalui 4 pusatnya yakni Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. Pelaksanaan tugas dari 4 pusat itu di fasilitasi oleh Sekretariat BPIW.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu, BPIW juga berpatokan pada sasaran pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Mataru Ichwan menjelaskan arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur PUPR, antara lain meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan energi.

Selain itu, dilakukan juga pembangunan untuk mendukung konektivitas nasional dalam rangka

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global. Arah kebijakan dan strategi lainnya yaitu berupa dukungan terhadap peningkatan kualitas permukiman di perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Sejalan dengan RPJMN tersebut, BPIW telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019 yang mengakomodasi arahan kebijakan strategi pembangunan infrastruktur PUPR untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional serta agenda Nawa Cita. Guna mengikuti dinamika yang ada saat ini, BPIW tengah mereview Renstra PUPR. Perkembangan dinamika yang ada seperti lingkungan strategis, isu strategis, kinerja 2015-2016, dan asumsi pendanaan merupakan faktor pendorong dilakukannya review Renstra. "Hasil review tersebut diharapkan dapat melahirkan Renstra PUPR yang efektif dan mampu merespon dinamika pembangunan," ungkap Rido beberapa waktu yang lalu.

Selain melakukan review Renstra, BPIW juga diamanahi untuk mengawal pelaksanaan *integrated tourism master plan* untuk 3 lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Guna mengikuti dinamika yang ada saat ini, BPIW tengah mereview Renstra PUPR. Perkembangan dinamika yang ada seperti lingkungan strategis, isu strategis, kinerja 2015-2016, dan asumsi pendanaan merupakan faktor pendorong dilakukannya review Renstra

“Jadi pembuatan *integrated tourism master plan* dijalankan hingga akhir Oktober 2018. Dengan dijalankannya program itu, maka perencanaan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan kepariwisataan diintegrasikan. Itu salah satu produk yang kita siapkan dan hasilkan tahun 2017,” ungkap Rido

(KSPN) prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika/Lombok. Ketiga KSPN yang merupakan bagian dari 10 KSPN ini mendapatkan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia. Pengembangan KSPN yang diprogramkan pemerintah tersebut diharapkan dapat mencapai target 20 juta turis mancanegara di tahun 2019 mendatang.

Menurut Rido *integrated tourism master plan* yang ditangani oleh BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis ini, merupakan integrasi rencana induk perencanaan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Artinya BPIW tidak hanya membuat perencanaan dukungan infrastruktur PUPR terhadap pariwisata, tapi juga mengintegrasikan pembangunan terkait pariwisata dari sektor-sektor terkait seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan.

Meski BPIW merupakan lembaga yang bertugas membuat perencanaan infrastruktur sektor PUPR, namun menurut Rido pemerintah mempercayakan kepada BPIW untuk mengawal proses *integrated tourism plan* mulai dari proses lelang internasional hingga penyusunan *integrated tourism plan* tersebut. Menurutnya BPIW akan mengemban kepercayaan pemerintah tersebut dengan kerja maksimal.

“Jadi pembuatan *integrated tourism master plan* dijalankan hingga akhir Oktober 2018. Dengan dijalankannya program itu, maka perencanaan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan kepariwisataan diintegrasikan. Itu salah satu produk yang kita siapkan dan hasilkan tahun 2017,” ungkap Rido beberapa waktu yang lalu.

Percepatan dukungan infrastruktur terhadap kawasan pariwisata itu juga untuk menyambut sidang tahunan *International Monetary Fund-World Bank* (IMF-WB) yang akan diadakan di Bali Tahun 2018. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan berskala internasional tersebut, Kementerian PUPR menyiapkan infrastruktur di 6 kawasan pariwisata yang akan menjadi daerah penerima manfaat dari sidang tahunan tersebut. Keenam lokasi tersebut yaitu Bali, Lombok, Labuan Bajo, Tana Toraja, Borobudur, dan Danau Toba.

Tidak hanya itu, BPIW juga masih mempersiapkan Anjungan Cerdas, dimana Anjungan Cerdas yang saat ini dibangun di Bendungan Tugu, Jawa Timur dan Jembrana, Bali merupakan *rest area* yang berada di jalan nasional. Selain menyediakan sarana dan prasaran seperti tempat pengisian bahan bakar, rumah makan, toilet dan tempat parkir, didalam Anjungan Cerdas juga disediakan tempat untuk pemasaran produk lokal.

Dengan demikian, Anjungan Cerdas juga berfungsi

KONSEP PENGEMBANGAN ANJUNGAN CERDAS

FUNGSI ANJUNGAN CERDAS

1

- **Tempat Istirahat** untuk meningkatkan keselamatan pemakai jalan nasional yang dilengkapi dengan fasilitas: Parkir, toilet, rumah makan, tempat sembahyang, serta taman.



2

- Sebagai **gardu pandang** pada berbagai infrastruktur PUPR berestetika tinggi dan keindahan lingkungan fisik sekitar



3

- **Pengenalan dan pemasaran berbagai produksi dan budaya lokal** kepada pemakai jalan nasional



KRITERIA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK KAWASAN PARIWISATA STRATEGIS

1 Menyiapkan kriteria kesiapan/*readiness criteria* untuk investasi infrastruktur pariwisata.



2 Menyediakan skema keuangan yang berkelanjutan untuk investasi pariwisata melalui penyiapan Studi Kelayakan, Amdal, *Detailed Engineering Design (DED)*, pembebasan lahan.



3 Membiayai pembangunan/Perbaikan/Peningkatan fisik seperti air bersih dan sanitasi, jalan, drainase, limbah padat, limbah rumah tangga, anjungan cerdas, museum, ruang terbuka hijau, lanskap, dan kawasan obyek wisata.



4 Mendorong dunia usaha dan masyarakat, BUMN, dan BUMD.

untuk mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, menurut Rido Anjungan Cerdas juga menjadi embrio pariwisata daerah setempat, karena dibuat berdekatan bendungan Tugu di Trenggalek dan suasana alam yang indah di Jembrana. Kesenian daerah juga dapat ditampilkan di anjungan ini.

Melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW telah menyusun *masterplan* dan *development plan* infrastruktur PUPR terpadu Kawasan Pelabuhan Patimban. Kemudian BPIW telah membuat *masterplan* dan *development plan* 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) termasuk WPS yang ke-35, yakni Pulau-Pulau Terluar. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Nawa Cita yakni membangun dari pinggiran. Kawasan diluar WPS juga menjadi perhatian BPIW, demikian juga kawasan perbatasan.

Sinkronisasi dan Keterpaduan Selalu Dilakukan

Selain itu juga telah dilakukan penajaman *masterplan* dan *development plan* WPS. Sinkronisasi dan keterpaduan program perencanaan juga dilakukan BPIW dengan unit organisasi (unor) Kementerian PUPR yang melaksanakan pembangunan fisik yakni Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Perumahan. Sinkronisasi dan keterpaduan program juga dilakukan dengan unor Kementerian PUPR yang berada di daerah dan pemerintah daerah di

seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan Konreg. Tahun 2017 Pra Konreg dilakukan di Palembang, Surabaya, Kupang, dan Manado. Sedangkan Konreg dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR. Pra Konreg dan Konreg yang dikawal Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR ini membahas rencana pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2018.

BPIW melalui Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR juga telah menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Pembangunan Infrastruktur PUPR. Rapat tersebut digelar untuk melakukan sinkronisasi perencanaan dengan kementerian lain terkait program prioritas nasional. Menurut Rido kegiatan itu digelar dengan harapan perencanaan dan program yang dihasilkan dapat bersinergi dan implementatif dalam menjawab kebutuhan dukungan infrastruktur PUPR dalam program prioritas nasional.

Dalam rapat ini beberapa instansi yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur turut hadir, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DDTT), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan

BPIW telah membuat *masterplan* dan *development plan* 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) termasuk WPS yang ke-35, yakni Pulau-Pulau Terluar. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Nawa Cita yakni membangun dari pinggiran. Kawasan diluar WPS juga menjadi perhatian BPIW, demikian juga kawasan perbatasan.



dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Selain itu dilakukan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 Pembangunan Infrastruktur PUPR Wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara.

Keterpaduan dengan pihak-pihak terkait dalam membangun infrastruktur menurutnya kerap dilakukan BPIW seperti membuat aksesibilitas di Maluku Utara. "Bila perlu di Provinsi Maluku Utara kita membuat sodetan di Halmahera," ucap Rido. Hal lain yang dilakukan BPIW yang bersifat koordinatif, seperti mendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk mendukung program nasional itu, BPIW sudah melakukan kesepakatan dengan kementerian atau lembaga yang berada dibawah Menko Perekonomian. "Dukungan terhadap KEK ini kita siapkan dengan perencanaan yang baik," tegasnya.

Selanjutnya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Program Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017 dilakukan terhadap pengembangan Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara.

Disisi lain, melalui Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW telah membuat *masterplan* dan *development plan* pulau dan kepulauan. Beberapa

masterplan pulau dan kepulauan itu diantaranya *Masterplan* Infrastruktur PUPR untuk Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Sedangkan *development plan* yang sudah dibuat

seperti *Development Plan* Infrastruktur PUPR Pulau Sumatera Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. BPIW juga ditugaskan untuk menjalankan apa yang sudah disiapkan sebelumnya, yakni mengenai pengembangan Kota Baru Publik Maja.

Terkait hal itu, BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan telah menyelesaikan penyusunan *masterplan* Kota Maja. "Setelah itu kita koordinasikan pembangunan Kota Maja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten dan kabupaten maupun kota yang berdekatan dengan Maja. Kita juga melakukan koordinasi dengan pengembang," tutur Rido.

Pengembangan Kota Baru Maja merupakan suatu pembangunan kota baru yang tidak dimulai dari lahan yang kosong. Semua kondisi eksisting yang diakomodir didalam pembangunan kota Maja.

Selain itu juga sudah ada kesepakatan, dimana PDAM dan Cipta Karya akan menyediakan air minum dari Waduk Karian. Salah satu pengembang yakni Citra Maja Raya yang saat ini juga sudah membangun perumahan yang berimbang di Kota Maja.

BPIW melalui Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR juga telah menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Pembangunan Infrastruktur PUPR. Rapat tersebut digelar untuk melakukan sinkronisasi perencanaan dengan kementerian lain terkait program prioritas nasional.

Pemantauan implementasi pengembangan kota baru, tidak hanya dilakukan BPIW terhadap Maja saja, tapi juga Kota Baru Mamuju dan Palangkaraya. Pemantauan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.

“Bila berkaitan dengan sektor PUPR, maka *masterpiece* pembangunan infrastrukturnya berupa bendungan, jalan tol dan jembatan serta perumahan. Untuk keciptakaryaannya lebih dimunculkan masalah pelayanan kepada masyarakat terutama untuk menengah ke bawah,” ungkap Rido.

Tahun 2017, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan juga telah melakukan Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* Kota Baru Sorong dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya serta Penyusunan Pra Desain Kawasan Prioritas.

Selanjutnya dilakukan *Review Masterplan*, *Development Plan* dan Penyusunan Pra Desain Kota Baru Tanjung Selor dan sekitarnya. Kemudian dilakukan Penyusunan *Masterplan*, *Development Plan* Kawasan Perkotaan di sekitar Danau Toba.

Penyiapan *Masterplan* Infrastruktur Pengembangan Kawasan Kota Sedang dilakukan terhadap Tebingtinggi, Dumai dan Singkawang. Penyiapan *masterplan* juga dilakukan untuk Kota Baru Palembang, Makassar, Manado.

Masterplan dan *Development Plan* Metropolitan Banjarkakula dan konsep Pengembangan Kota Lama Semarang juga dibuat. Selanjutnya ada Penyusunan *Masterplan* dan Pra Desain KPPN

di Pulau Sumatera dan Kota Kecil di Perbatasan Kalimantan.

Tidak hanya itu, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan juga melakukan Penyusunan *Masterplan* dan Pra Desain Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Pulau Sulawesi dan Kota Kecil di Perbatasan Nusa Tenggara dan Papua. Selanjutnya ada Penyiapan Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur PUPR KPPN. Kemudian dilakukan Pemantauan Implementasi Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Kawasan Perdesaan.

Pengembangan lingkungan strategis juga menjadi perhatian BPIW. Sehubungan dengan itu kata Rido, BPIW juga mendukung *One Road Initiative* atau OBOR. Program ini disiapkan atau diinisiasi oleh pemerintah China, karena program ini berimplikasi terhadap pembangunan infrastruktur PUPR pada lokasi tertentu seperti di Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. “ Dengan program tersebut maka produksi yang dihasilkan Indonesia, bisa dibawa ke negara-negara yang termasuk ke dalam OBOR tersebut,” ulas Rido.

Dalam melaksanakan semua kegiatan tersebut menurut Sekretaris BPIW, Firman Hatorangan Napitupulu, BPIW telah melakukan konsolidasi internal untuk mengakomodir masukan-masukan dari berbagai pihak demi kemajuan BPIW. “Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban, harus didukung sumber daya manusia atau SDM yang memadai,” tutur Firman. Dengan kesiapan SDM yang memadai diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan fungsi BPIW kedepan. **(Tim Redaksi/Alis).**

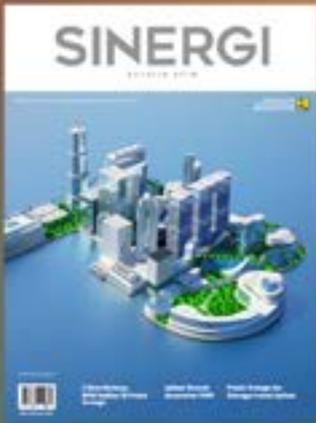
Pemantauan implementasi pengembangan kota baru, tidak hanya dilakukan BPIW terhadap Maja saja, tapi juga Kota Baru Mamuju dan Palangkaraya. Pemantauan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.



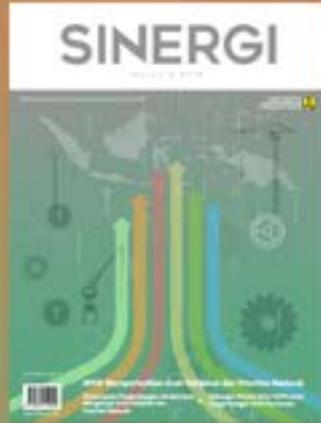
Rumah untuk MBR di Maja.

Sumber: Dok. BPIW

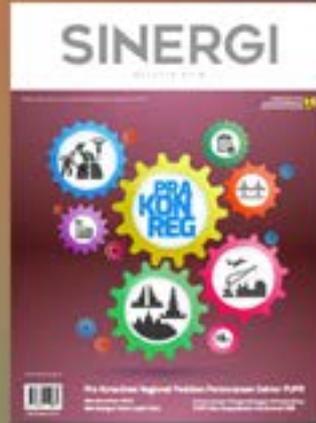
Kaleidoskop 2017



Januari



Februari



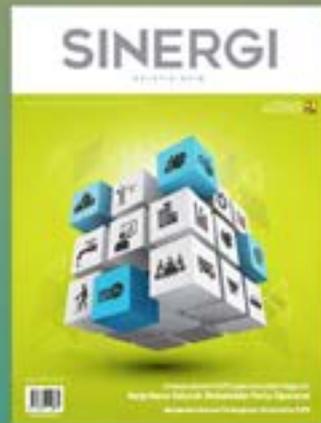
Maret



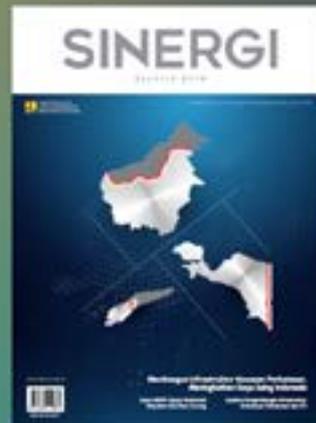
April



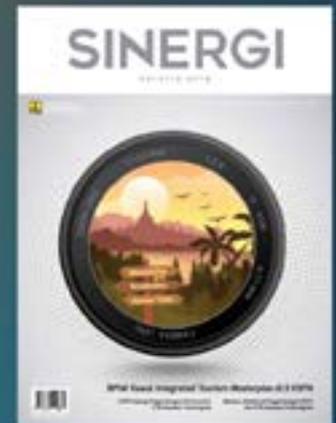
Mei



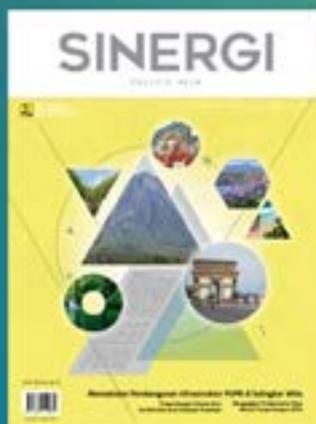
Juni



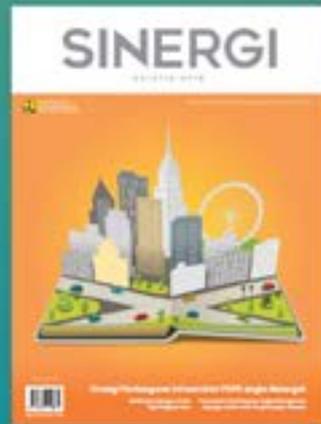
Juli



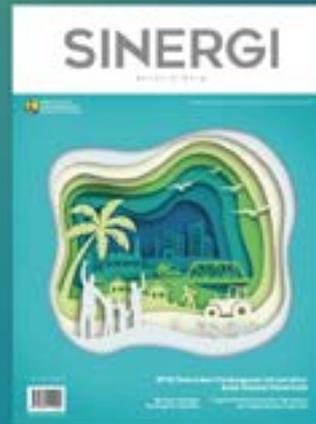
Agustus



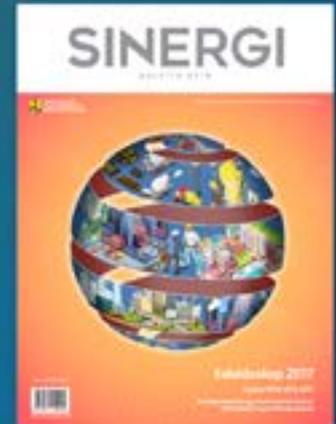
September



Oktober



November



Desember

Sepanjang 2017, BPIW Kementerian PUPR telah melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana kegiatan yang telah dilakukan dimuat di buletin Sinergi yang setiap bulannya terbit (dengan tampilan cover yang tergambar di atas). Selain di buletin, kegiatan BPIW juga dimuat di website. Dari sejumlah berita, kali ini tim redaksi Buletin Sinergi merangkum kegiatan-kegiatan penting BPIW di sepanjang tahun 2017. Berikut ulasannya pada Kaleidoskop 2017 :

Januari 2017

Kementerian PUPR Dukung Kedaulatan Pangan Nasional



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan infrastruktur yang menjamin ketersediaan air untuk sektor pertanian dan hortikultura. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Demikian ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan pada sesi *Inspiring Performax* di Berita Satu TV yang mengangkat tema "Membangun Infrastruktur Pangan", Jakarta, Rabu (11/1).

Pada sesi tersebut hadir juga nara sumber lainnya, yakni pelaku usaha hortikultura yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Agrinex 2017, Rifda Ammarina.

Menurut Rido, program Kementerian PUPR pada 2015-2019 dalam menunjang sektor pertanian dan kedaulatan pangan, antara lain pembangunan 65 bendungan, pembangunan 1 juta hektare (Ha) irigasi baru, 3 juta Ha rehabilitasi irigasi serta pembangunan embung-embung untuk pengadaaan air baku. **(ris/infoBPIW)**

Dukung Akses Jalan dari Bandara Baru Kulonprogo ke Borobudur, BPIW Lakukan Survei Lapangan



Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan instansinya melakukan survei ke lapangan, untuk menentukan, alternatif akses jalan mana yang dapat dijadikan pilihan untuk dikembangkan dalam menghubungkan bandara baru di Kulonprogo dengan kawasan pariwisata Borobudur. Dengan adanya akses langsung dari bandara baru tersebut menuju Borobudur, diharapkan dapat mendukung destinasi wisata tersebut.

"Saya sudah tugaskan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis untuk melakukan survei. Akses jalan menuju kawasan pariwisata ini menjadi strategis dalam mempercepat pengembangan pariwisata terutama di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Danau Toba di Sumatera Utara," ujar Rido, Kamis (12/1).

Saat ini, menurut Rido, BPIW sedang menyiapkan Rencana Pengembangan Kawasan Terpadu (*Integrated Masterplan*) di tiga kawasan pariwisata itu. Penyusunan *masterplan* tersebut diperlukan agar rencana pengembangan kawasan ini terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. **(Hen/infobpiw)**

Kepala BPIW: Tren Hunian Masa Depan di Barat dan Timur Kawasan Jabodetabekjur



Tren hunian masa depan diprediksi akan berkembang ke arah Barat dan Timur kawasan Metropolitan Jakarta-Depok-Bogor-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur). Tepatnya, pada kawasan Tangerang-Maja dan Bekasi-Karawang. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan saat ditemui wartawan di ruangan kerjanya, Jakarta, (14/1).

Menurut Rido, pada tahun 2018 dan 2019 berbagai proyek infrastruktur strategis di Jakarta akan selesai dibangun. Seperti dua transportasi masal Ibu Kota dengan sistem *Transit Oriented Development* (TOD) yakni Light, *Rapid Transit* (LRT) dan *Mass Rapid Transit* (MRT) tahap I yang menghubungkan Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI.

"Kemudian studi kelayakan tahap II sudah selesai dilakukan. Proyek tahap II akan mulai dibangun sebelum proyek tahap I beroperasi. Target proyek tahap II beroperasi tahun 2020. Akan ada juga tambahan MRT dan LRT yang menghubungkan ke arah Barat dan Timur," ujar Rido. **(ris/InfoPUPR)**

Dua Tahun Berdiri, BPIW Lahirkan 10 Produk Strategis



Selama dua tahun berdiri, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2016 telah menghasilkan 10 produk strategis yang mengacu pada tugas dan fungsi.

Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat melakukan paparan pencapaian kinerja 2 tahun BPIW dalam Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR yang mengambil tema "Membangun Infrastruktur Menuju Pembangunan yang Berkeadilan" di Gedung Serba Guna (GSG) Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (17/1).

Rido mengatakan, 10 produk dari BPIW tersebut yakni, produk-produk strategis dari BPIW Kementerian PUPR. (ris/infoBPIW)

BPIW - BPOPKP Danau Toba Koordinasi Terkait *Integrated Tourism Masterplan*



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan

koordinasi dengan Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata (BPOPKP) Danau Toba terkait penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* Danau Toba, Borobudur dan Lombok di ruang rapat utama BPIW, Jakarta, Kamis (19/1).

Koordinasi tersebut dihadiri Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan didampingi jajarannya dan Kepala BPOPKP Danau Toba, Aries Prasetyo.

Rido mengatakan, saat ini penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* Danau Toba, Borobudur dan Lombok sudah memasuki penyelesaian tahap akhir *term of reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) semua kawasan.

Setelah penyelesaian TOR tuntas, lanjut Rido, kemudian BPIW melalui Kementerian PUPR akan memasukan pada proses lelang. "Untuk proses lelang akan dilakukan di LPSE LKPP (Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,-red)," terangnya. (ris/infoBPIW)

Kementerian PUPR-Unesco IHE Jajaki Peluang Kerja Sama Pengembangan Bidang Pengairan



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan melakukan peninjauan peluang kerja sama dengan Unesco IHE, yakni lembaga pendidikan pascasarjana bidang pengairan internasional yang berbasis di Delft, Belanda.

Rencana peninjauan kerja sama tersebut terungkap saat Direktur Bisnis Unesco IHE, Johan A. Van Dijk dan jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPIW, Jakarta, Senin (23/1). Kunjungan perwakilan Unesco IHE tersebut disambut langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan didampingi jajaran pejabat BPIW.

Rido menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR melalui BPIW menggunakan metode pendekatan wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dalam mewujudkan sasaran strategis pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

"Seluruh wilayah Indonesia masuk ke dalam 35 WPS," terangnya. Menurutnya, dalam WPS terdapat kawasan industri, kawasan wisata, kota baru publik, kawasan lumbung pangan dan lainnya. (ris/infoBPIW)

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan KSPN Bromo-Tengger-Semeru



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendorong pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur.

“Dukungan infrastruktur PUPR guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di KSPN tersebut (Bromo-Tengger-Semeru,-red), pada tahun 2017 ini akan ada penataan bangunan kawasan mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan,” papar Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat Koordinasi Dukungan Infrastruktur Pengembangan Destinasi Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta, Senin (23/1).

Dalam rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono ini, hadir juga perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata serta perwakilan Pemerintah Kabupaten-Kota se Jawa Timur.

Rido mengatakan, ada juga rencana melaksanakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Malang. “Kemudian pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kota Malang,” paparnya. **(ris/info BPIW)**

BPIW Tajamkan Program Infrastruktur PUPR

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya menajamkan program-program pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat memberikan arahan dan membuka acara Konsinyasi Penyusunan Program Arahkan Pengembangan Wilayah Tahun Anggaran 2018 di Tangerang, Selasa (24/2).



Lebih lanjut Rido menyatakan program-program infrastruktur PUPR 2018 harus mengacu dan mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.

Untuk mendukung tema pemerintah tersebut menurut Rido program-program yang diterapkan Kementerian PUPR mendatang harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018.

Acara yang digelar Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, dihadiri Sekretaris BPIW serta seluruh kepala pusat dan perwakilan unit kerja di lingkungan BPIW, Kementerian PUPR. **(ris/infoBPIW)**

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR Sudah Pertimbangkan Aspek Lingkungan Hidup



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) memastikan bahwa aspek lingkungan hidup menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan infrastruktur PUPR. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kehutanan (KLHK) dan BPIW di ruang rapat utama BPIW, Jakarta, Kamis (26/1).

Rapat dihadiri Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan beserta jajarannya. Sementara itu hadir juga Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, KLHK, Laksmi Wijayanti.

Rido mengatakan, BPIW sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab dalam menterpadukan pengembangan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup agar pembangunan yang dilakukan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam penyusunan masterplan dan *development plan* Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) maupun kawasan perkotaan dan perdesaan telah disertai dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dinamika dalam pengelolaan lingkungan hidup dan keehatan hendaknya disertai dengan penerapan peraturan yang sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. **(Ind/ris/infobpiw)**

BPIW Lakukan Rapat Koordinasi Persiapan *Integrated Masterplan for Priority Destination*



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan *Integrated Masterplan for Priority Destination* Danau Toba, Borobudur, dan Lombok di Jakarta, Kamis (27/1).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Keuangan, dan Badan Otorita Danau Toba, serta Bank Dunia.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan, paparan TOR *Integrated Tourism Masterplan* Danau Toba, Borobudur, dan Lombok dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan dari semua pihak pemangku kepentingan. **(ris/infobpiw)**

Februari 2017

Kunjungi BPIW, Pemerintah Jepang Tertarik Jajaki Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur



Pemerintah Jepang menyatakan tertarik melakukan peninjauan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia. Hal itu terungkap saat Direktur Kerja Sama Internasional, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Yoshikazu Kuki didampingi stafnya, Yuriko Takanagi mengunjungi Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (22/2).

Kunjungan delegasi Pemerintah Jepang tersebut disambut langsung Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo didampingi Kepala Bidang Penyelenggara Rencana Strategis dan Analisa Manfaat, Zevi Azzaino dan jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut, Yoshikazu Kuki mengakui, Pemerintah Jepang sangat tertarik melakukan berbagai peninjauan kerja sama dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia.

"Peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia sangat menarik. Sehingga, kami ingin dapat turut bersama-sama mengembangkan berbagai infrastruktur," kata Yoshikazu. **(ris/infoBPIW)**

Pemkab Sambas Kunjungi BPIW, Bertekad Percepatan Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas, Provinsi Kalimantan Barat berharap dukungan pemerintah pusat dapat semakin besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerahnya. Demikian disampaikan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili saat kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat (24/2).

Kunjungan kerja Pemkab Sambas tersebut diterima langsung Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan didampingi jajaran dan perwakilan



Unit Organisasi di Kementerian PUPR.

“Memberi perhatian yang besar terhadap Kabupaten Sambas sangatlah tak berlebihan, karena Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah perbatasan strategis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia,-red),” ungkap Atbah. Ia mengakui, saat ini di Kabupaten Sambas telah berdiri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk yang cukup membuat iri warga negara tetangga di wilayah tersebut. Hanya saja kehadiran PLBN tersebut, lanjutnya, masih perlu ditambah berbagai infrastruktur penunjang lainnya agar manfaat pembangunannya makin dapat dirasakan masyarakat. (ris/infoBPIW)

Kementerian PUPR akan Buat *Shopping List* Infrastruktur Sektor PUPR



Kementerian PUPR akan membuat *shopping list* atau daftar belanja Infrastruktur sektor PUPR untuk tahun 2018 melalui kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg). Kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Maret itu akan dilaksanakan di 4 kota besar di Indonesia, yakni Palembang, Surabaya, Manado, dan Kupang. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Kementerian PUPR, Harris Hasudungan Batubara menjelaskan Pra Konreg merupakan forum konsolidasi dan koordinasi dengan unit organisasi (Unor) terkait seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA), dan Penyediaan Perumahan baik di level pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah daerah

terutama Pemerintah Provinsi juga dilibatkan dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur sektor PUPR tersebut.

“BPIW telah membuat rencana mengenai indikasi prioritas pembangunan infrastruktur PUPR yang akan dilaksanakan tahun 2018. Untuk itu kita telah menyusun *masterplan* dan *development plan* pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kita membuat *masterplan* dan *development plan* merujuk pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. *masterplan* dan *development plan* tersebut dibuat dengan kebutuhan akan infrastruktur PUPR di kawasan itu, sehingga bisa berfungsi dan beroperasi,” ucap Harris, Selasa (28/2).

Shopping list ini merupakan hasil diskusi yang disepakati baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang dilakukan saat Pra Konreg. Nantinya *shopping list* ini juga akan disampaikan saat pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg). Selanjutnya keluaran dari kegiatan tersebut akan disampaikan pada saat digelarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang akan diselenggarakan pada bulan April mendatang.

(Hen/infobpiw)

Maret 2017

Pengembangan Kota di Indonesia Dilakukan Secara Terintegrasi



Pengembangan kota di Indonesia dilakukan secara terintegrasi. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan integrasi yang dilakukan dengan kerja sama antar kota dalam satu wilayah seperti Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Banjar Bakula atau disebut juga Metropolitan Banjarmasin Raya. Hal itu disampaikan saat Bedah Buku “Kota Layak Huni”, di Kementerian PUPR, awal Maret lalu.

Kawasan Banjar Bakula ini menghubungkan lima daerah yaitu Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan sebagian Kabupaten Tanah Laut. Luas kawasan Banjar Bakula ini diperkirakan mencapai 340.446 hektar atau 9,07 persen luas wilayah Kalsel.

Ditempat terpisah, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga menjelaskan

untuk kawasan metropolitan ada 5 metropolitan baru, yakni Banjarmasin, Manado, Padang, Palembang Raya, dan Mataram. Dari lima metropolitan baru, yang telah diselesaikan *masterplannya* pada tahun 2016 adalah Palembang Raya dan Manado. Tahun 2017 direncanakan diselesaikan *masterplan* metropolitan baru yaitu Banjarmasin. Tahun 2018 akan diselesaikan *masterplan* Padang dan Mataram. (ris/infobpiw)

Perlu Akselerasi Pengembangan Kota Baru Publik Maja



Kementerian PUPR berkomitmen memacu percepatan pengembangan Kota Baru Publik Maja. Hal ini sejalan dengan tujuan awal penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan para pengembang di sekitar kawasan Kota Baru Publik Maja. Demikian ditegaskan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam rapat "Monitoring Percepatan Pembangunan Kawasan Kota Baru Publik Maja," di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (2/3).

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Perusahaan Perumahan Nasional (Perumnas), beberapa pengembang serta perwakilan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Kawasan Kota Baru Publik Maja. Pada tahun 2016 Kementerian PUPR telah menginisiasi penandatanganan kesepakatan bersama, yang esensinya antara lain Kementerian PUPR memiliki kewajiban membuat rencana induk atau *masterplan* Kota Baru Publik Maja, perencanaan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan akses Maja serta pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan jalan akses Maja. Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan Banten memiliki kewajiban untuk melakukan penetapan lokasi ruas jalan akses Maja. Pemkab Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan melakukan fasilitasi koordinasi pengadaan tanah jalan akses Maja, fasilitas perizinan pengembangan Kota Baru Publik Maja. (ris/infoBPIW)

BPIW Gelar Bedah Buku "Mewariskan Kota Layak Huni"



Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan acara Bedah Buku "Mewariskan Kota Layak Huni" di Kementerian PUPR, Kamis (3/2). Kegiatan yang dibuka Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan ini menghadirkan penulis buku, "Mewariskan Kota Layak Huni", Nirwono Joga, Prof. Roos Akbar serta Lana Winayanti sebagai penanggap.

Rido mengatakan, esensi dari buku yang dibedah sangat erat kaitannya dengan tugas BPIW, yakni melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategis keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur PUPR.

"Acara ini akan mampu menyegarkan dan menambah wawasan baru bagi kita insan BPIW dalam merencanakan, membangun kota serta wilayah secara terpadu dan komprehensif," yakin Rido.

Ia berharap, penyegaran serta penambahan khazanah keilmuan tersebut dapat diterapkan dalam penyusunan *masterplan* dan *development plan* tiga tahunan atau satu tahunan. "Dengan begitu, produk-produk BPIW akan semakin terjamin kualitasnya dan selalu mengikuti kebutuhan zaman," terang Rido. (ris/infoBPIW)

Lima Kementerian Lakukan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan KPPN



BPIW Kementerian PUPR melakukan Penandatanganan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan *Masterplan* Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019.

Penandatanganan kesepakatan yang dilakukan perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPTT), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dilaksanakan di Jakarta, Selasa (7/3).

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, penandatanganan tersebut menghasilkan kesepakatan yakni, pengembangan kawasan perdesaan diselenggarakan sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui peningkatan keterkaitan pembangunan kota-desa dengan memperkuat sedikitnya 39 pusat pertumbuhan baru sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang selanjutnya disebut sebagai KPPN. (Shindie/InfoBPIW)

Membumikan NUA dalam Membangun Kota di Tanah Air



Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan atau Konferensi Habitat III telah diselenggarakan di Quito, Ekuador pada 2016 lalu. Konferensi tersebut dihadiri perwakilan 197 negara anggota PBB dan menyepakati untuk mengadopsi *New Urban Agenda* (NUA)/Agenda Baru Perkotaan yang merupakan dokumen hasil konferensi tersebut. NUA merupakan cetak biru landasan pembangunan perkotaan dalam mendukung 2030 *Agenda on Sustainable Development*, khususnya *Sustainable Development Goal II* yakni menciptakan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mengadopsi dokumen NUA. Bahkan, Indonesia mengharapkan NUA dapat membantu mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi perkotaan di Indonesia.

Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan mengatakan, delegasi Indonesia pada Konferensi PBB tersebut diwakili oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) untuk PBB, Dian Triansyah Djani, Duta Besar RI untuk Ekuador, Diennaryati Tjokrosuprihatono, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial dan Budaya, Lana Winayanti, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dan Deputi

Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Arifin Rudiyanto.

"Agenda Baru Perkotaan atau NUA disepakati untuk 20 tahun kedepan sebagai panduan dalam pembangunan perkotaan dunia," ungkap Rido dalam rapat "Membumikan NUA di Indonesia" di Kantor BPIW, beberapa waktu lalu. (ris/infoBPIW)

Buka Pra Konreg di Palembang, Sekjen Kementerian PUPR Tekankan Pentingnya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur



Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anita Firmanti Eko Susetyowati, membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) wilayah Sumatera di Palembang, Selasa (7/3) malam. Pada kesempatan tersebut Anita menekankan pentingnya keterpaduan pembangunan infrastruktur sektor PUPR agar lebih efektif dan efisien. "Forum ini harus dilakukan dalam rangka mendukung program pembangunan terpadu, dimana pembangunan infrastruktur PUPR yang kita lakukan berbasis pengembangan wilayah," ujar Anita.

Dengan keterpaduan menurut Anita setiap pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung pemerintah pusat semata, tapi juga menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota. "Bila tidak ada keterpaduan, maka pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak sinkron. Jadi memang keterpaduan harus kita lakukan. Jadi misalnya pemerintah akan membangun kawasan industri, maka Kementerian PUPR mendukung dengan misalnya membangun jalan, menyediakan sarana air minum, dan perumahan bagi pekerja kawasan industri itu," tutur Anita.

Menyinggung peran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), menurut Anita BPIW punya peran penting dalam menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo terutama terkait Nawacita. "Setiap pembangunan infrastruktur yang kita lakukan berdasarkan arahan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dari situ BPIW menterjemahkan apa yang harus dilakukan Kementerian PUPR supaya meningkatkan daya saing negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Hen/Ind/infoBPIW)

Program pembangunan Infrastruktur PUPR Harus Mampu Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017



Program-program pembangunan infrastruktur PUPR harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018. Hal ini untuk mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, Rabu (1/3).

Untuk itu, langkah-langkah yang harus diterapkan menurut Rido, antara lain memperbaiki kualitas belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri. Kemudian mendorong peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur.

“Selain itu, program yang diciptakan perlu memprioritaskan belanja pemerintah untuk mencapai sasaran prioritas nasional. Langkah-langkah itu dilakukan melalui pendekatan *money follow* program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial,” tegasnya.

Hen/infobpiw

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Lakukan Serah Terima Jabatan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan serah terima jabatan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kantor BPIW, Jakarta (10/03).



Serah terima jabatan dilakukan oleh Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Periode 2015-2017, Harris Hasudungan Batubara kepada Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR yang baru, Iwan Nurwanto.

Serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan disaksikan segenap jajaran pejabat di lingkungan BPIW. Dalam sambutannya, Rido mengatakan, pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pematapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada bangsa dan negara.

Rido mengucapkan selamat menjalankan tugas di tempat baru kepada Harris Hasudungan Batubara, teriring apresiasi dan ucapan terima kasih atas kinerja yang telah dicapai selama ini.

“Dengan pengalaman yang saudara miliki, saya berharap saudara senantiasa dapat memberikan yang terbaik. (bri/infobpiw)

Dharma Wanita Persatuan BPIW Adakan Sosialisasi SPAK



Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR melakukan pertemuan 4 bulanan, di ruang rapat BPIW, Selasa (14/3). Kepala Dharma Wanita Persatuan BPIW, Yurida Rido mengatakan pertemuan rutin kali ini diisi dengan sosialisasi gerakan yang disebut Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Dikatakannya, sosialisasi anti korupsi bagi anggota Dharma Wanita tersebut bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa.

"Sosialisasi SPAK ini dalam rangka mendukung kerja DWP Kementerian PUPR tahun 2017 dan juga melaksanakan program kerja bidang pendidikan DWP BPIW," jelas istri Kepala BPIW Rido Matari Ichwan itu.

Tujuan dari sosialisasi menurutnya untuk mengenalkan SPAK, karena SPAK hakikatnya merupakan pendidikan moral yang mengajarkan anti korupsi berbasis keluarga. "SPAK mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran," ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi SPAK ia berharap, para anggota DWP yang merupakan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat mendukung para suami agar dapat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja pada Kementerian PUPR yaitu rasional, kerjasama tim, inovasi, efisiensi, efektifitas, responsif dan kemitraan.

"Kita sebagai perempuan memiliki kekuatan dibalik kelembutan kita, dan kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai kejujuran dan mengingatkan kepada suami agar mereka bisa menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi. Dalam slogan SPAK juga disebutkan bahwa kekuatan perempuan merupakan inspirasi perubahan," ucap Yurida Rido. **(Hen/INI/infobpiw)**

Pengembangan Infrastruktur PUPR di KPPN Perlu Sesuai Kebutuhan



Skala prioritas dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mesti mengacu pada kebutuhan setiap Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) sesuai karakteristiknya. Demikian ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat menyampaikan arahan dalam "Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Pengembangan KPPN Tahun 2017" di Jakarta, Senin, (13/3). Rapat koordinasi tersebut dihadiri Perwakilan Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) serta pemerintah kabupaten (Pemkab) lokasi 10 KPPN yang akan disusun masterplannya pada 2017.

Rido menerangkan, posisi dukungan infrastruktur PUPR dalam pengembangan KPPN dapat berada di depan atau pertengahan. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap KPPN. "Jangan sampai

dukungan infrastruktur PUPR dilakukan di depan atau awal-awal, namun tak semua infrastruktur yang terbangun dapat dimanfaatkan secara optimal akibat tak sesuai kebutuhan KPPN," papar Rido. Selain itu, Rido mengatakan, dalam melakukan perencanaan pengembangan KPPN harus efektif sekaligus mampu meningkatkan perekonomian. Dengan begitu dukungan perlu diarahkan agar masyarakat perdesaan mampu meningkatkan nilai tambah.

(Cin/Ris/infoBPIW)

Kementerian PUPR Dorong Perencanaan Infrastruktur yang Kredibel



Setelah menggelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk provinsi wilayah Sumatera di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) pada 7-9 Maret lalu. Kali ini, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Bali di Surabaya, Jawa Timur, 14-16 Maret 2017.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam video sambutannya mengatakan, sejak dua tahun terakhir Kementerian PUPR telah menerapkan dasar perencanaan dan pemrograman dengan metode kewilayahan. "Salah satu tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia," papar Basuki, Selasa (14/3).

Dengan begitu, lanjutnya, perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR perlu memperhatikan potensi dan daya dukung masing-masing wilayah, agar belanja kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur menjadi lebih efektif. "Kemudian, dalam perencanaan tidak boleh selalu diartikan mengkonsep keinginan, namun perencanaan diarahkan mengkonsep hal yang dibutuhkan, sehingga hasil pembangunannya dapat segera dimanfaatkan dan dibutuhkan masyarakat," jelas Basuki. Ia menambahkan, perencanaan juga mesti dapat menyentuh wilayah terisolasi, agar dapat menekan kemahalan harga di wilayah tersebut. **(ris/ind/infoBPIW)**

Temui Kepala BPIW, Tim PUG Kementerian PUPR Bahas Isu Gender



Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian PUPR bersama Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Budaya, Baby S. Dipokusumo melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rido Matari Ichwan beserta jajarannya, di ruang rapat BPIW, Kamis (16/3). Baby mengatakan kedatangan timnya ini, untuk melakukan Koordinasi dan sosialisasi mengenai *gender*. Dari pertemuan ini, ia berharap BPIW dapat memasukkan program-program pembangunan infrastruktur yang *responsif gender*.

Sebagai pimpinan BPIW, Rido menyambut baik kunjungan tersebut. Apalagi PUG ini merupakan suatu kebijakan atau upaya pemerintah yang dikawal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Kebijakan ini bertujuan memberikan pengertian kepada kita semua, bahwa *gender* ini menyangkut persamaan lelaki dan perempuan. Kemudian juga ditambahkan dengan lansia, balita, dan orang yang berkebutuhan khusus," tutur Rido.

Dalam kesempatan itu, Rido juga menyampaikan bahwa untuk beberapa hal, seperti gedung BPIW telah memberikan sarana yang bersifat *responsif gender*. Sarana tersebut dalam bentuk kondisi trotoar jalan di depan gedung yang dibuat landai sehingga mudah dilewati masyarakat yang menggunakan kursi roda maupun anak-anak.

Salah satu Anggota Tim Sekretariat PUG-PUPR, Lilla Norhayati juga berharap untuk beberapa program, BPIW dapat melakukan PUG. Ia melihat peluang itu ada, terutama pada program Anjungan Cerdas, baik di Trenggalek (Jawa Timur) dan Rambut Siwi (Bali).

(Hen/infobpiw)

BPIW Gelar Sosialisasi Tax Amnesty untuk Para Pegawai

BPIW Kementerian PUPR) menggelar Sosialisasi Tax Amnesty atau pengampunan pajak di Kantor BPIW, Jakarta, Jumat (17/3).

Sosialisasi Tax Amnesty yang difasilitasi Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat BPIW ini, dikhususkan untuk pegawai di lingkungan BPIW dengan menghadirkan pemateri dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru IV, yakni Christijanto Wahyu Purwoistijoko, Kepala KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru IV,



Hariyono, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru IV, serta Farida, *Account Representative* KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru IV.

Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru yang hadir untuk memberikan sosialisasi tentang Tax Amnesty kepada para pegawai BPIW.

Ia mengaku mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut karena kegiatan ini dapat menambah pemahaman bagi para pegawai di lingkungan BPIW terkait Program Tax Amnesty Pajak. (ris/infoBPIW)

Buka Pra Konreg di Kupang, Sekjen Kementerian PUPR Ajak Semua Pihak Bekerja Efektif dan Efisien



Dalam melakukan penyusunan program infrastruktur, Kementerian PUPR fokus untuk mencapai target prioritas nasional. Selain itu program yang disusun tersebut benar-benar dipertajam. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti,

saat membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Selasa (21/3) malam. Dengan keterbatasan fiskal, Anita juga meminta kepada seluruh *stakeholder* untuk bekerja secara efektif dan efisien.

Dengan anggaran yang sangat terbatas, mari kita bekerja dengan baik, dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan," tegas Anita. Dalam kesempatan itu, Anita juga menegaskan bahwa Kementerian PUPR mendukung kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, terutama yang ada di Pulau Kalimantan dan NTT. Selain itu menurut Anita, Kementerian PUPR juga mendukung destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), termasuk di Labuan Bajo, NTT.

Dalam kesempatan itu Anita juga menyampaikan bahwa daya saing Indonesia pada sektor infrastruktur mengalami kenaikan, dimana untuk 2014-2015 pada posisi 72, dan meningkat tahun 2015-2016 yakni pada posisi 64. **(Hen/Ind/InfoBPIW)**

Kementerian PUPR Gelar Prakonreg Terakhir di Kota Manado Tahun 2017



Tahun 2017, Kota Manado merupakan Kota keempat dan sekaligus menjadi Kota terakhir tempat berlangsungnya pelaksanaan Pra Konsolidasi (Pra Konreg) yang digelar oleh Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Kegiatan ini digelar untuk memadukan perencanaan pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi yang ada di Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menilai Pra Konreg yang dilaksanakan BPIW Kementerian PUPR sangat bermanfaat terutama bagi pengembangan daerahnya. "Apalagi dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pra Konreg, maka program pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara akan diprioritaskan pemerintah pusat," Hal ini disampaikan pada saat digelarnya Pra Konreg ke-4 di Manado, Kamis (30/3).

Dengan pembangunan infrastruktur menurutnya dapat meningkatkan belanja daerah dan pada akhirnya dapat mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sulawesi Utara. Dalam kesempatan itu, Steven juga memuji Kementerian PUPR yang selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsinya. "Saya bilang Kementerian PUPR koordinasinya mantap. Selalu berkoordinasi dengan kita," pujiannya. **(Hen/Ind/info BPIW)**

April 2017

Kementerian PUPR Arahkan RKPD Jambi Mendukung Pencapaian Sasaran Nasional



Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2017 di Jambi, Selasa (5/4). Musrenbang yang mengambil tema "Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Percepatan Menuju Jambi Tuntas 2021" ini digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jambi 2018.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional KPPN/Bapenas, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi dan DPD RI Utusan Provinsi Jambi.

Sekretaris BPIW yang mewakili Menteri PUPR, Dadang Rukmana menyatakan, Kementerian PUPR mendorong agar Pemprov Jambi dapat memiliki RKPD 2018 yang menunjang sasaran strategis nasional.

Ia menjelaskan, saat ini kebutuhan anggaran untuk infrastruktur nasional mencapai sekitar Rp 2.200 triliun, namun kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 1.250 triliun. "Sehingga, alokasi kegiatan pembangunan mesti dipilih untuk yang super prioritas," terangnya. **(ris/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Siapkan Dukungan Infrastruktur Untuk Tiga Kabupaten di Provinsi Aceh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan sejumlah program dukungan pembangunan infrastruktur untuk tiga kabupaten di Provinsi Aceh, yakni Aceh Besar, Bireun dan Gayo Lues.

Perencanaan program infrastruktur tersebut juga merupakan bagian dari *Grand Design Alternatif Development*. Program ini



difokuskan pada terobosan tanggap darurat narkoba nasional yang menyorot pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kementerian PUPR salah satu instansi pemerintah yang turut ikut serta pada program yang dicanangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut.

Saat memberikan paparan pada rapat kerja implementasi *Grand Design* Alternatif Development itu di Kota Banda Aceh, Kamis (6/4), Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan beberapa program pembangunan infrastruktur.

Dikatakannya untuk Kabupaten Aceh Besar sektor PUPR akan mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal diantaranya industri peternakan sapi, pertanian kopi, dan coklat. Kementerian PUPR juga akan mendukung pengembangan industri pariwisata dan olahraga alam di Kabupaten Bireun. Sedangkan di Kabupaten Gayo Lwes, menurut Rido dukungan instansinya terkait pengembangan lahan tanaman ganja menjadi areal pertanian lainnya. **(Ind/infobpiw)**

BPIW Gelar Sosialisasi Undang-Undang Jasa Konstruksi



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Sosialisasi dan Diskusi Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) di Jakarta, Senin (10/4).

Sosialisasi yang dihadiri jajaran pejabat dan staf di lingkungan BPIW ini menghadirkan nara sumber, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, Dr. Ir. Darda Daraba, MS.i. Kepala BPIW, Ridho Matari Ichwan, saat membuka acara Sosialisasi

dan Diskusi UUJK mengatakan, acara tersebut digelar agar insan BPIW semakin paham terhadap peraturan perundang-undangan khususnya bidang ke-PU-an. Hadirnya pemahaman tersebut, ujar Ridho, dapat memberikan peningkatan kompetensi dan kinerja pelayanan publik.

“Tentunya dalam menjalankan tugas kita untuk memastikan pembangunan jalan, waduk, sanitasi, air minum, sarana persampahan, rumah susun, dan infrastruktur PUPR lainnya berjalan secara terpadu dan sinergi sesuai dengan arahan rencana induk (masterplan) dan rencana pengembangan (*development plant*) infrastruktur wilayah,” paparnya. **(Tim/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sampah di KSPN Prioritas



Kementerian PUPR melalui BPIW, mendukung pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) prioritas. Pasalnya, pengelolaan sampah di KSPN prioritas dinilai masih belum optimal.

“Untuk itu diperlukan inovasi dan antisipasi peningkatan volume sampah, agar kebersihan dan keindahan destinasi wisata dapat tetap terpelihara dengan baik,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah di 10 KSPN yang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (11/4).

Dalam rapat yang dipimpin Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Teknologi dan Budaya Maritim, Kemenko Maritim, Safri Burhanuddin ini dihadiri perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lokasi 10 KSPN.

Rido menegaskan, terpeliharanya kebersihan dan keindahan di destinasi wisata, diharapkan dapat mendukung tercapainya target pariwisata nasional berupa jumlah kunjungan turis asing 20 juta di tahun 2019.

Kementerian PUPR, lanjutnya, dalam melakukan pengembangan infrastruktur menerapkan metode yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokkan pada 35 WPS. **(ris/infobpiw)**

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan Butuh Kerjasama Lintas Daerah



Dalam empat dekade ini, populasi penduduk perkotaan meningkat 6 kali lipat, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan perkotaan seperti *backlog* perumahan, timbulnya permukiman kumuh, banjir, kemacetan, meningkatnya kriminalitas serta disparitas yang semakin tinggi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibutuhkan kerjasama yang kuat antar sektor, antar daerah, dan antar tingkat pemerintahan. Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga, saat menjadi narasumber pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) dalam Rangka Identifikasi Kota dalam Pengendalian dan Pengelolaan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), di Yogyakarta, (11/4).

Kota memiliki fungsi internal dan eksternal. Selain dituntut untuk dapat menyediakan infrastruktur dasar bagi masyarakat, sebuah kota juga dituntut untuk memenuhi fungsi eksternal untuk dapat melayani kebutuhan kota-kota di sekitarnya yang memiliki hierarki lebih kecil, sehingga perlu kerjasama lintas daerah,” tutur Agusta. Kementerian PUPR telah menerbitkan beberapa Peraturan Menteri yang memuat standar pelayanan minimal, dan pedoman pengelolaan infrastruktur PUPR, sehingga dapat digunakan sebagai input dalam menyusun Standar Pelayanan Perkotaan,” tambahnya.

Kegiatan yang diadakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan menjaring aspirasi daerah terkait dengan Pengendalian dan Pengelolaan Standar Pelayanan Perkotaan, sehingga dapat mendorong strategi dan kebijakan pembangunan perkotaan yang berdaya saing dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan RPJMN 2015-2019. (Miqdam/infoBPIW)

Kementerian PUPR Dukung Akselerasi Pengembangan Infrastruktur di Riau

Kementerian PUPR melalui BPIW mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur di Provinsi Riau, sehingga diharapkan dapat mewujudkan peningkatan daya saing di wilayah tersebut. Hal itu ditegaskan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam seminar pembangunan



nasional “Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Daya Saing Riau,” di Balai Serimbit, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (19/4).

Hadir pembicara lain dalam seminar nasional tersebut, Pakar Sosiologi Pendidikan yang juga Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof. Ravik Karsidi.

Dadang menerangkan, melakukan akselerasi pengembangan infrastruktur pada hakekatnya merupakan upaya membangun masyarakat dan negara. Pasalnya, untuk mencapai masyarakat dan negara yang maju senantiasa memerlukan infrastruktur yang memadai.

Dengan begitu, lanjutnya, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR dalam menunjang sasaran nasional, antara lain meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. “Tujuannya agar dapat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi,” paparnya. (ris/infoBPIW)

BPIW Lakukan *Review Renstra* Kementerian PUPR 2015-2019



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan *review Rencana Strategis* (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019.

Kepala BPIW yang juga selaku Ketua Tim Pengarah *Review Renstra*, Rido Matari Ichwan mengatakan, perkembangan dinamika yang ada saat ini mendorong untuk melakukan *review* terhadap Renstra Kementerian PUPR 2015-2019.

"Tujuan agar keberadaan Renstra Kementerian PUPR dapat menjadi arah kebijakan program, kegiatan serta pendanaan yang efektif, dan mampu merespon dinamika pembangunan yang ada," papar Rido saat menyampaikan arahan kebijakan dalam *Kick Off Meeting Midterm Review Renstra PUPR* di Jakarta, Kamis (20/4).

Rido menerangkan, sejumlah perkembangan dinamika yang mengalami perubahan, antara lain lingkungan strategis, isu strategis serta kinerja 2015–2016 dan asumsi pendanaan.

"Untuk lingkungan strategis, misalnya ada perubahan arah kebijakan terkait prioritas nasional yang tercantum dalam Perpres No. 3 Tahun 2016, PP No. 13 Tahun 2017, Direktif Presiden dan lainnya," terangnya. **(ris/infoPUPR)**

Infrastruktur Miliki Peran Strategis dalam Kemajuan Ekonomi



Pengembangan infrastruktur memiliki peran yang sangat strategis dalam kemajuan ekonomi negara. Pasalnya, pada proses pembangunan maupun pasca pembangunan, hanya pengembangan infrastruktur yang memiliki efek berantai. Termasuk, daya ungkit dalam pertumbuhan ekonomi.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan dalam *Ministerial Lecture* yang mengangkat tema "Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Strategi Pembiayaan untuk Percepatan Pembangunannya," di Universitas Islam Bandung (Unisba), Bandung, Sabtu, (22/4).

Untuk itu, lanjutnya, pengembangan infrastruktur yang dilakukan suatu negara pada hakekatnya merupakan upaya nyata membangun ekonomi masyarakat. Sebab, untuk mencapai kemajuan ekonomi senantiasa memerlukan infrastruktur yang memadai.

Rido juga memaparkan, untuk arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR dalam menunjang sasaran nasional, antara lain meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. **(ris/infoBPIW)**

Bahas RPP Perkotaan, BPIW Gelar Rakor untuk Tampung Sejumlah Masukan



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Unit Organisasi (Unor) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, guna mendapat masukan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perkotaan di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga menyampaikan, Kementerian PUPR memiliki peran yang besar dalam pengelolaan perkotaan, khususnya dalam penyelenggaraan infrastruktur.

"RPP Perkotaan yang tengah disusun Kemendagri merupakan peraturan bersama untuk memecahkan masalah-masalah perkotaan, baik berkaitan dengan infrastruktur, penataan ruang, perhubungan, dan lain sebagainya, sehingga memerlukan masukan, salah satunya dari Kementerian PUPR sebagai kementerian teknis," papar Agusta.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Manggas Rudy Siahaan mengatakan, RPP Perkotaan perlu memuat pengaturan pendanaan dan pembiayaan infrastruktur. Pasalnya, ada beberapa perkotaan yang berada pada lintas batas administrasi kabupaten/kota bahkan provinsi. **(Miqdam/infoBPIW)**

BPIW Dukung Pengembangan Kota Soreang Terpadu dan Berkelanjutan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur Kota Soreang Terpadu dan Berkelanjutan (KSTB) di Kabupaten Bandung.

Demikian ditegaskan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga saat menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung ke kantor BPIW di Jakarta, Rabu (26/4).

Untuk mendukung pengembangan infrastruktur KSTB, ungkap Agusta, BPIW akan mendetaikan lebih lanjut *masterplan* Kota Metropolitan Cekungan Bandung. "Kita akan lebih fokuskan lagi



untuk Soreang, khususnya untuk program 2018 yang sudah dibuat dalam pra konsultasi regional untuk Kabupaten Bandung,” terangnya. Agusta pun berharap, pagu indikatif yang sudah disetujui dapat mencukupi pengembangan infrastruktur di Kota Soreang dan sekitarnya. **(ind/infoBPIW)**

Mei 2017

Inovasi Pembiayaan Dibutuhkan untuk Percepatan Pengembangan Infrastruktur



Kementerian PUPR terus melakukan berbagai inovasi skema pembiayaan, agar dapat melakukan percepatan pengembangan infrastruktur PUPR di Tanah Air.

Hal itu dilakukan mengingat masih adanya kesenjangan antara kemampuan dan kebutuhan anggaran, yakni kebutuhan pembiayaan infrastruktur sektor ke-PUPR-an pada 2014-2019 mencapai Rp. 2.232 triliun, namun kemampuan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara,-red) mencapai Rp.1.226 triliun,” ungkap Kepala BPIW, Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat memberikan kuliah umum “Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Strategi Pembiayaan untuk Percepatan Pembangunan,” di Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (2/5).

Hadir dalam kuliah umum ini, guru besar, para dosen, serta mahasiswa-mahasiswi dari jurusan Planologi, Universitas Trisakti.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur menurut Rido, inovasi pembiayaan menjadi sebuah tuntutan, agar pengembangan infrastruktur dapat dilakukan sesuai harapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). **(Ris/infoBPIW)**

BPIW Gelar Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2016



BPIW Kementerian PUPR menggelar evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2016 di lingkungan BPIW sekaligus membahas rencana aksi reformasi birokrasi BPIW di tahun 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam acara “Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BPIW Tahun 2016 dan Pembahasan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BPIW Tahun 2017” yang dibuka langsung Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana di Bogor, beberapa waktu lalu.

Dadang menjelaskan bahwa sejak tahun 2015, BPIW telah melaksanakan program reformasi birokrasi dengan mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. “Pada perjalanan tahun ketiga ini, ada banyak capaian yang diraih. Selain itu, ada juga sasaran yang masih harus diupayakan secara optimal pencapaiannya,” papar Dadang.

Ia mengungkapkan, saat ini pelaksanaan program reformasi birokrasi secara nasional sudah memasuki tahap kedua (2015-2019) dari total tiga tahap pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. **(bri/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Optimis Pencapaian Program Sejuta Rumah Makin Optimal

Kementerian PUPR optimis pencapaian program sejuta rumah makin optimal pada tahun mendatang. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, Kementerian PUPR untuk melaksanakan program sejuta rumah telah melakukan beragam perannya dalam penyediaan rumah/hunian, khususnya bagi



Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Seperti membangun rumah susun, serta rumah khusus,” ungkap Rido saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sebagai keynote speaker dalam diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat “Kupas Tuntas Dua Tahun Program Sejuta Rumah,” di Jakarta, Selasa (9/5).

Rido menyatakan pemerintah juga menyalurkan bantuan stimulan, subsidi serta insentif. “Stimulan untuk perumahan swadaya, bantuan subsidi untuk rumah umum, dan insentif pembiayaan bagi konsumen,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan-kemudahan. Terbukti, sejak tahun 2015 telah banyak peraturan yang diterbitkan untuk memberikan kemudahan, baik bagi para penyedia perumahan maupun bagi para calon konsumen. **(ris/infoBPIW)**

BPIW Dukung Pengembangan Probolinggo sebagai Kota Pusaka



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan Kota Probolinggo sebagai Kota Pusaka. Demikian terungkap dalam kunjungan kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo yang dipimpin langsung Walikota Probolinggo, Rukmini Buchori ke kantor BPIW, Rabu (10/5).

Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan mengatakan, Pemkot Probolinggo dalam pengembangan Kota Pusaka perlu membuat sesuatu yang khas bagi Kota Probolinggo. “Adanya yang menjadi ciri khas, akan membuat daya tawar kuat bagi Kota Probolinggo untuk terus

dikunjungi wisatawan,” terangnya.

Menurutnya, Kota Probolinggo masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 14, yakni Surabaya - Pasuruan - Banyuwangi. Seperti diketahui, lanjutnya, saat ini Kementerian PUPR menggunakan metode pengembangan infrastruktur yang berbasis wilayah atau WPS.

Pengembangan infrastruktur Kota Probolinggo merupakan pendetailan dari *masterplan* dan *development plan* WPS 14 yang sudah ada,” terangnya. **(ris/infoBPIW)**

BPIW Gelar Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2019-2021

BPIW Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan jangka pendek (2019-2021), keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. Untuk rakor pertama dilaksanakan di Batam, awal pekan ini. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rido Matari Ichwan mengatakan, sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan jangka pendek di Batam difokuskan pada Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

“Untuk ketiga provinsi tersebut masuk dalam WPS I, yakni Sabang-Banda Aceh-Langsa,” terang Rido. Menurutnya, hal itu bagian dari pengembangan infrastruktur yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Menurutnya, arah kebijakan dan strategi pembangunan Kementerian PUPR dalam menunjang sasaran nasional, antara lain meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi.

Selain itu, pembangunan untuk mendukung konektivitas nasional untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global. **(ing/infoBPIW)**



Pengembangan Bandar Kayangan, Konektivitas Jalan Jadi Prioritas



Kementerian PUPR memprioritaskan pengembangan infrastruktur konektivitas jalan di Kota Baru Publik Bandar Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu guna mendukung terwujudnya pelabuhan Global Hub di Bandar Kayangan.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, pengembangan konektivitas jalan menjadi prioritas. "Pasalnya, lebar jalan di wilayah Bandar Kayangan belum optimal karena sebagian besar masih memiliki lebar 7 meter," ungkap Rido usai Rapat Pengembangan Bandar Kayangan di Lombok Timur, NTB, beberapa hari lalu.

Rido menjelaskan, kondisi jaringan jalan di Lombok secara umum sudah baik dan beraspal. Selain itu, jaringan jalan di Pulau Lombok telah terkoneksi dengan kawasan pariwisata, bandara, pelabuhan dan pusat kota Mataram.

Lebih lanjut dikatakannya, pengembangan Kota Baru Publik Bandar Kayangan berpijak pada konsep pengembangan yang berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

"Secara geografis Bandar Kayangan sendiri merupakan salah satu lokasi lintasan strategis dunia. Tepatnya, jalur laut II di Nusantara," ujar Rido seraya menambahkan, pada jalur perairan tersebut kapal-kapal dari Eropa, Afrika Tengah, Australia, Asia Tenggara, dan Asia Timur dengan aman karena kondisi perairannya relatif stabil dan tak rawan badai. **(Ind/infoBpiw)**

Dukung Kawasan di Sumut, Kementerian PUPR Siapkan Pengembangan Konektivitas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menggenjot pengembangan infrastruktur konektivitas PUPR di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). "Pengembangan infrastruktur konektivitas PUPR, mulai dari pengembangan jalan nasional, jembatan serta jalan tol," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat Rapat Pembahasan Detail Program Integrasi Pengembangan Kawasan



Provinsi Sumut di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (18/5). Rido menjelaskan, saat ini di Sumut telah ada perencanaan sejumlah kawasan tematik, antara lain Kawasan Industri (KI) seperti Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun dan Batubara serta KI Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara. "Kemudian, Kawasan Kabupaten Tertinggal di Nias Utara dan Nias Barat," terang Rido. Selain itu, ada juga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toba yang meliputi Kabupaten Dairi, Karo, Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Samosir. "Ada juga Kawasan Metropolitan Mebidangro yakni Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deli Sedang dan Karo," terang Rido. Ia menambahkan, ada juga Kawasan Pelabuhan seperti Pelabuhan Strategis Tol Laut Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara serta Kawasan Perikanan Nusantara Sibolga di Kota Sibolga. **(ris/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Siap Sukseskan Program 100 Ribu Homestay di Desa Wisata



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap ambil bagian dalam menyukseskan Program 100 Ribu Unit *Homestay* (tempat menginap) di Desa Wisata yang digulirkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada Rapat Koordinasi Nasional Kemenpar yang mengambil tema "20.000 Homestay Desa Wisata 2017" di Jakarta, Kamis (18/5).

Menurut Rido, salah satu dukungan infrastruktur PUPR terhadap dunia pariwisata Indonesia berupa membangun *homestay* di Desa Wisata. "Salah satu alternatif untuk pengembangan *homestay* di desa wisata dapat melalui program pengembangan Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh," terang Rido.

Melalui konsep Kotaku, ujar Rido, *homestay* di desa wisata dapat ditingkatkan melalui pemugaran dan peremajaan hunian warga. "Serta ada juga pemukiman kembali, yakni pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena dapat membahayakan," ujar Rido. **(ris/infoBPIW)**

Firman Hatorangan Jabat Sekretaris BPIW Kementerian PUPR



Posisi jabatan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR mengalami penyegaran. Hal itu terungkap dalam pelantikan 13 Pejabat Tinggi Pratama (setingkat eselon II) dan 1 Pejabat Pengelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (23/5).

Posisi Sekretaris BPIW Kementerian PUPR saat ini diemban, Firman Hatorangan Napitupulu yang menggantikan Dadang Rukmana. Adapun Dadang Rukmana kini menempati posisi baru sebagai Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

Dalam arahnya, Menteri Basuki menyatakan, mutasi, rotasi dan promosi jabatan merupakan hal wajar dan akan terus terjadi dalam rangka dinamisasi dan memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pejabat yang dilantik memiliki peran dan fungsi masing-masing dan akan memperkuat organisasi. **(ris/infoBPIW)**

BPIW Dukung Peningkatan Keseimbangan Pertumbuhan Kota dan Desa

Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan keseimbangan pertumbuhan di kota dan perdesaan. Saat ini upaya tersebut dilakukan melalui percepatan pengembangan keterpaduan infrastruktur PUPR



yang berbasis kewilayahan.

"Pola ini dikenal juga dengan WPS atau Wilayah Pengembangan Strategis. Dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan menjadi 35 WPS," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Ridho Matari Ichwan dalam *Forum Group Discussion (FGD)* "Pemantapan Pembangunan Wilayah melalui Sistem Perkotaan dan Keterkaitan Desa-Kota Dalam Merespon Fenomena Urbanisasi" yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (23/5).

Menurutnya, dalam WPS terdapat kawasan-kawasan tematik yang pengembangan infrastruktur didukung Kementerian PUPR, mulai dari 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), seperti Muncar di Kabupaten Banyuwangi atau Komodo di Kabupaten Labuan Bajo. Rido menjelaskan, pengembangan infrastruktur terhadap 40 KPPN diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perdesaan. **(ris/infoBPIW)**

Sekretaris BPIW Kementerian PUPR Lakukan Serah Terima Jabatan



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan acara serah terima jabatan Sekretaris BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta (26/5). Serah terima jabatan dilakukan oleh Sekretaris BPIW Kementerian PUPR Periode 2015-2017, Dadang Rukmana kepada

Juni 2017

Sekretaris BPIW Kementerian PUPR yang baru, Firman Hatorangan Napitupulu.

Serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan yang disaksikan segenap jajaran pejabat di lingkungan BPIW.

Dalam sambutannya, Rido menyatakan, mutasi dan rotasi jajaran pejabat struktural merupakan sesuatu yang alami. Hal itu selalu akan terjadi pada setiap instansi pemerintah. "Hal ini juga merupakan bagian dari dinamika kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai," ungkap Rido.

Menurutnya, mutasi dan rotasi hendaklah dimaknai sebagai tuntutan kepentingan organisasi guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada segenap *stakeholder*.

(ris/hen/infoBPIW)

BPIW Lakukan Percepatan Pembangunan Anjungan Cerdas Inkubasi di Bendungan Tugu



BPIW Kementerian PUPR melakukan percepatan dalam melaksanakan pembangunan Anjungan Cerdas di Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Demikian terungkap dalam kunjungan kerja (Kunker) rombongan BPIW yang dipimpin langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan ke lokasi pembangunan Anjungan Cerdas di Bendungan Tugu, Senin (29/5).

Hadir dalam rombongan Kunker BPIW tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Hadi Suahyono, Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi, P Yudhantoro, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anjungan Cerdas Bendungan Tugu, Fransisco beserta jajaran staf di lingkungan BPIW.

Rido berharap, pembangunan proyek Anjungan Cerdas di Bendungan Tugu dapat selesai sesuai waktu yang telah direncanakan. Ia menjelaskan, pada dasarnya Anjungan Cerdas merupakan rest area multifungsi di jalan nasional yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung dan dikemas secara modern. **(ris/ind/infoBPIW)**

Infrastruktur Diarahkan Dongkrak Kunjungan Wisatawan ke Morotai



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Morotai.

Pengembangan infrastruktur PUPR di KSPN Morotai diperlukan untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan didampingi jajarannya saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Morotai, Provinsi Maluku Utara, beberapa hari lalu. Dalam rombongan Kunker ini hadir juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga beserta jajarannya.

Pada Kunker ke Morotai ini, rombongan menyempatkan meninjau beberapa lokasi destinasi, seperti Pulau Dodola, Pulau Zumzum serta Musieum Perang Dunia II untuk mendapat gambaran guna pengembangan destinasi wisata di KSPN Morotai.

Ia mengatakan, saat terwujud tumbuhnya kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Morotai, diharapkan dapat mendukung tercapainya target pariwisata nasional berupa jumlah kunjungan turis asing 20 juta di tahun 2019. **(ing/infoBPIW)**

Tahun 2018, Kementerian PUPR Akan Laksanakan 6 Prioritas Pembangunan Infrastruktur

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyatakan ada 6 prioritas pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan Kementerian PUPR di tahun 2018. Hal ini disampaikan Rido saat menyampaikan Laporan Hasil Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) pada pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis petang (8/6).



Keenam prioritas tersebut adalah, pertama, pembangunan berbasis wilayah. Kedua, pelaksanaan kegiatan pekerjaan *committed* seperti penyelesaian persiapan Asian Games XVIII dan dukungan penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank. Ketiga, ketahanan air dan kedaulatan pangan. Prioritas keempat adalah konektivitas. Prioritas kelima adalah peningkatan kualitas kehidupan berupa air minum, sanitasi, persampahan, rusun, dan rumah swadaya. Prioritas yang keenam program kerakyatan.

(Hen/ris/infobpiw)

Rapat Koordinasi Program Tiga Tahunan, Untuk Hasilkan Program Bagi Daerah



BPIWKementerian PUPR melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Jangka Pendek 2019-2019, di Semarang, 15-16 Juni. Saat membuka kegiatan tersebut Plt. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo mengatakan kegiatan tersebut sebagai wadah bagi seluruh *stakeholder* agar melakukan koordinasi, sehingga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan daerah. Tujuan kegiatan ini pertama, untuk melaksanakan koordinasi atau konsolidasi program PUPR, program pembangunan bidang PUPR, termasuk sinkronisasi antar sektor. Kedua, untuk melakukan sinkronisasi, mensinergikan dan menterpadukan masing-masing wilayah pengembangan strategis," ungkap Bobby saat membuka acara tersebut, Kamis (15/6).

Lebih lanjut dikatakannya bahwa rapat koordinasi ini dilakukan di 11 lokasi yakni Batam, Padang, Gorontalo, Tarakan, Semarang, Banjarmasin, Surabaya, Labuan Bajo, Pangkal Pinang, Sorong, dan Palu. (Hen/infobpiw)

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah, BPIW Susun Pra Desain Kawasan Kota Lama Semarang



BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, melakukan penyusunan Pra Desain Kawasan Kota Lama Semarang. Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai permasalahan, rencana, dan program perwujudan Kota Pusaka Semarang dan Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS).

Rapat koordinasi ini merupakan rapat kedua dalam rangka penyusunan Pra Desain tersebut. Pada kesempatan koordinasi pertama, tanggal 6 April lalu yang merupakan tahap *kick off*, dimana kami dan tim menampung berbagai masukan dan arahan mengenai visi pengembangan Kota Lama Semarang," ujar Agusta saat membuka kegiatan itu di Semarang, Kamis (15/6). Pada tahap *kick off* tersebut juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu.

Setelah tim melakukan survei dan pengumpulan data menurut Agusta, maka dilakukan pemaparan konsep awal pengembangan Kota Lama Semarang dengan mensinkronkan rencana dan program dari berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Semarang, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juata. Selain itu juga disinkronkan dengan rencana program permukiman dan keciptakaryaan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. (Hen/Shovi/infobpiw)

Pengembangan Banjarbakula Membuka Peluang Industri dan Pariwisata

Banjarbakula (Kota Banjarmasin-Kota Banjarbaru-Kab Banjar-Kab Barito Kuala-Kab Tanah Laut) merupakan salah satu pusat metropolitan baru di luar Pulau Jawa yang diamanatkan dalam RPJMN 2014-2019 dan PP No.13 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Nasional. Sehubungan dengan hal itu, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga menyatakan Banjarbakula akan dikembangkan sebagai Kawasan Metropolitan berbasis potensi tepi air yang membuka peluang industri dan pariwisata.



Kawasan Metropolitan ini juga bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS 22 Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, yang menghubungkan antara Pusat Kegiatan Nasional atau PKN Balikpapan-Samarinda dan PKN Palangkaraya, sehingga Banjarbakula memiliki pengaruh penting sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil produksi Pulau Kalimantan,” ujar Agusta, saat membuka Rapat Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* atau MPDP Metropolitan Banjarbakula, Banjarmasin, (19/6).

Lebih lanjut Agusta menjelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga direncanakan 5 jalan bebas hambatan yang melalui Banjarbakula yaitu Kuala Kapuas-Banjarmasin, Marabahan-Banjarmasin, Banjarmasin-Liang Anggang, Liang Anggang-Martapura serta Liang Anggang-Pelaihari. (dhi/infoBPIW)

Koordinasi yang Intensif Perlu Dilakukan, dalam Menyusun Program 3 Tahunan



BPIW Kementerian PUPR kembali melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2019–2021. Bila sebelumnya dilaksanakan di Semarang, kali ini kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Banjarmasin, 19-20 Juni.

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto berharap forum-forum koordinasi atau diskusi seperti yang dilakukan di Banjarmasin ini akan lebih

diintensifkan, sehingga pembangunan infrastruktur yang terpadu dapat tercapai. Lebih lanjut Iwan menyatakan bahwa rapat koordinasi yang menyusun program 3 tahunan tersebut merupakan suatu rangkaian proses yang akan berkelanjutan, sehingga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan daerah.

Rangkaian proses penyusunan ini dimulai dari rencana tata ruang wilayah nasional provinsi maupun kabupaten/ kota, kemudian dipertimbangkan oleh PUPR untuk dimasukkan ke dalam *masterplan* dan *development plan* yang mencakup pengembangan kawasan pedesaan maupun perkotaan, “ungkap Iwan saat membuka acara tersebut, Senin (19/6). Sehubungan dengan pendanaan infrastruktur PUPR, menurut Iwan, pendanaan bersumber dari APBN adalah pilihan terakhir. (Dhi/infoBPIW)

Juli 2017

Infrastruktur Tingkatkan Pertahanan dan Keamanan Nasional



Kementerian PUPR turut meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional melalui pengembangan infrastruktur PUPR.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, infrastruktur merupakan aspek strategis dalam peningkatan pertahanan dan keamanan nasional. Salah satunya dengan mengikat seluruh wilayah Indonesia dengan infrastruktur yang terintegrasi, komprehensif dan holistik.

“Saat ini Kementerian PUPR telah memberikan berbagai dukungan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional diantaranya, melalui penanganan kawasan perbatasan melalui pembangunan dan perbaikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan dan perbaikan jalan kawasan perbatasan serta peningkatan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan,” ungkap Rido saat menyampaikan “Peran Infrastruktur PUPR Mendukung Pertahanan dan Keamanan Nasional” di Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI, beberapa waktu lalu.

(lisa/infoBPIW)

Halalbihalal Wahana untuk Semakin Mendekatkan Pejabat dengan Pegawai



BPIW turut meramaikan acara silaturahmi dan halalbihalal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (3/7) kemarin.

Acara yang digelar pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran ini dipimpin Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono. Pada kesempatan tersebut Menteri PUPR didampingi istri serta pejabat eselon I Kementerian PUPR menyalami satu per satu para pegawai Kementerian PUPR.

Usai kegiatan tersebut, Basuki mengatakan, halalbihalal merupakan sarana untuk mempererat silaturahmi. "Selain itu, acara halalbihalal ini juga dapat menjadi wadah untuk lebih mendekatkan para pejabat dengan para pegawai dan staf di Kementerian PUPR," paparnya. Ia berharap, setelah libur hari raya Idul Fitri 2017 para pegawai dapat segera kembali bekerja dengan semangat baru "Kita adakan silaturahmi untuk mempererat kebersamaan agar semua bisa langsung kerja," tegasnya.

Hal senada diterangkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan. Menurutnya, libur hari raya tahun ini berlangsung cukup panjang. "Saat ini (libur,-red) telah usai, sehingga semua pegawai, khususnya di lingkungan BPIW perlu kembali fokus pada pekerjaan," terangnya. **(Hen/ris/infoBPIW)**

Kementerian PUPR dan Kementerian Pariwisata Bahas 4 Agenda Percepatan Pengembangan KSPN

Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Kementerian Pariwisata, Hiramasyah S. Thaib beserta jajarannya, melakukan pertemuan dengan para pejabat di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono dan Sekretaris BPIW, Firman Hatorangan Napitupulu, Kamis (6/7).

Dalam kunjungan yang berlangsung di ruang rapat BPIW tersebut, Hiramasyah mengatakan ada empat agenda yang menjadi tujuan kunjungan timnya ke BPIW. Agenda pertama adalah, ingin membahas percepatan berkaitan dengan *dashboard monitoring* destinasi



wisata, terutama yang ada di Kementerian PUPR.

"*Dashboard monitoring* ini yang memantau perkembangan 10 destinasi kawasan pariwisata prioritas dan juga berkaitan dengan pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara," ungkap Hiramasyah. **(Hen/infobpiw)**

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Kawasan Industri Konawe



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan Pengembangan Kawasan Industri (KI) Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

"Salah satunya Kementerian PUPR telah melakukan penyusunan *Master Plan dan Development Plan* (MPDP,-red) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di lokasi KI Konawe berada," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat "Evaluasi Pembangunan Kawasan Industri Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara," di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (6/7).

Kemudian, lanjutnya, akan ada percepatan pengembangan infrastruktur PUPR mulai dari dukungan jalan, sumber daya air, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penataan lingkungan permukiman di kawasan tersebut. Ia juga menerangkan, terdapat juga jaringan irigasi yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan KI Konawe.

Dalam rapat yang dipimpin langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan tersebut, Pemerintah pusat memastikan KI Konawe, Sulawesi Tenggara sudah tidak ada kendala administrasi dan perizinan. Sehingga, saat ini tinggal percepatan eksekusi di lapangan. **(ris/infobpiw)**

Halal Bihalal Perekat Ikatan Persaudaraan Insan BPIW



Halal Bihalal yang biasa dilakukan usai Hari Raya Idul Fitri, menjadi momen yang harus dimanfaatkan seluruh insan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR untuk mempererat ikatan persaudaraan. Dengan halal bihalal juga diharapkan dapat menciptakan keakraban dan komunikasi antar unit kerja.

Demikian disampaikan Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat memberikan kata sambutan pada pelaksanaan Halal Bihalal yang diikuti seluruh jajaran pimpinan dan staf BPIW, di Kementerian PUPR, Jumat (7/7).

Menuru Rido, membina keakraban antar unit kerja tersebut sangat penting, mengingat alur kerja BPIW membutuhkan koordinasi lintas unit kerja. "Kita sangat berharap kegiatan ini dapat menciptakan keakraban dan komunikasi yang lebih baik lagi, apalagi produk yang dihasilkan pusat yang satu, digunakan pusat yang lain, sehingga perlu komunikasi yang baik satu sama lain," ujar Rido. **(Hen/infobpiw)**

Penyusunan Sinkronisasi Program 3 Tahunan, Akan Berdampak Positif Bagi Papua



Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musaad menganggap langkah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi Rapat Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek

2019 – 2021 (program 3 tahunan), akan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerahnya. Saat ini menurut Musaad, infrastruktur termasuk infrastruktur yang dibangun PUPR merupakan salah satu yang mendorong pembangunan di Papua.

saat memberi kata sambutannya pada acara yang digelar Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW tersebut, di Sorong, Papua Barat, Rabu (12/7).

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto berharap forum-forum koordinasi atau diskusi seperti yang dilakukan di Kota Sorong ini akan lebih diintensifkan. "Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang terpadu dapat tercapai," ucap Iwan. Lebih lanjut Iwan menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan suatu rangkaian proses yang akan berkelanjutan, sehingga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan daerah. **(hen/ris/infobpiw)**

Susun MPDP, BPIW Pacu Akselerasi Pengembangan Kota Baru Sorong



BPIW Kementerian PUPR memacu akselerasi pengembangan Kota Baru Publik Sorong, Provinsi Papua Barat.

Untuk mewujudkan percepatan tersebut BPIW menyusun *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) Kota Baru Publik Sorong dan kota di sekitarnya. Demikian terungkap dalam diskusi dengan tema "Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* Kota Baru Sorong dan Sekitarnya" di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (13/7).

Turut hadir dalam kegiatan yang digelar BPIW tersebut, perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, Pemkab Raja Ampat, Pemkab Manokwari, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, saat ini kota-kota di Indonesia tengah mengalami perkembangan yang kurang memperhatikan keseimbangan dan keserasian dari kota itu sendiri.

"Padahal dalam 4 dekade terakhir (1970-2010,-red), penduduk perkotaan di Indonesia meningkat 6 kali lipat. Dari 20 juta menjadi 120 juta, dan peningkatan jumlah penduduk perkotaan terus berlanjut," terangnya. **(ris/hen/infoBPIW)**

BPIW Ramaikan Pameran Indonesia *International Smart City Expo and Forum 2017*



BPIW Kementerian PUPR turut berpartisipasi meramaikan pameran Indonesia *International Smart City and Forum* yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, (12-14/7).

Dalam talkshow bertema “*Smart City Development in Developing Countries Challenges and Opportunities*” yang digelar usai pembukaan, hadir pembicara antara lain, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan, BPIW Kementerian PUPR, Eko Budi Kurniawan, Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, Direktur E-Government Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Firmansyah Lubis, *Head of Consulting Fros Sullivan*, Subhanshu Sekhar, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kadin, Eddy Hussy, serta perwakilan *Asia Development Bank*, Rabin Hattari.

Eko Budi Kurniawan menyatakan, BPIW membuat standar untuk Kota Cerdas Berkelanjutan itu harus memiliki sejumlah komponen pokok, antara lain *Smart Living, Smart Economy and Mobility, Smart Ecological Environment* serta *Smart Governance and Community*.

“Kata *smart* disini, tidak terbatas pada penggunaan ilmu teknologi aplikasi, akan tetapi kita menggunakan juga teknologi-teknologi lainnya dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan,” ujar Eko. (ind/infoBPIW)

Komisi V DPR RI Apresiasi Pembangunan Anjungan Cerdas

Pembangunan Anjungan Cerdas di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mendapat apresiasi dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal itu terungkap saat rombongan DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis meninjau langsung proses pembangunan Anjungan Cerdas dan Bendungan Tugu pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Jawa Timur, Jumat, (14/7) kemarin.

Fary menyatakan, pembangunan Anjungan Cerdas merupakan konsep baru yang patut diapresiasi sebagai sarana meningkatkan keamanan berkendara serta meningkatkan perekonomian di wilayah di sekitarnya. “Kendati begitu pembangunan Anjungan Cerdas jangan sampai mengakibatkan kemacetan seperti keberadaan *rest area* kebanyakan,” ujarnya.



Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ridho Matari Ichwan menerangkan, pembangunan Anjungan Cerdas ini menganut beberapa konsep yang diaplikasikan BPIW. Antara lain, ungkap Rido, pertama hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PUPR bahwa dalam perjalanan, seorang pengemudi memerlukan istirahat setelah mengemudi selama 4 jam berkendara. Kedua, lanjut Rido, BPIW menerapkan konsep pengembangan wilayah strategis. (Lia/Ing/infoBPIW)

BPIW Gelar Audiensi Strategi Pembangunan Perkotaan Indonesia



Sejumlah isu wilayah dan perkotaan yang masih mengemuka di Tanah Air, antara lain; kesenjangan, belum terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), rendahnya daya saing kota serta belum optimalnya pengelolaan perkotaan.

Demikian dipaparkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat membuka “Audiensi Strategi Pembangunan Perkotaan Indonesia” di Kantor BPIW, Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (19/7). Dalam pertemuan tersebut hadir tokoh perkotaan yang juga mantan Menteri Pekerjaan Umum periode 1998-1999, Rachmadi Bambang Sumadhijo, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Agus Wijanarko, mantan Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus serta seluruh perwakilan unit organisasi di Kementerian PUPR.

Rido mengatakan, untuk dapat menyelesaikan isu-isu perkotaan memang diperlukan mendengar dari banyak kalangan. “Termasuk para senior yang telah berpengalaman menangani isu-isu perkotaan,” terangnya. (ris/infoBPIW)

Kementerian PUPR dan Kementerian DPDTT Sepakat Akselerasi Pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi



BPIW Kementerian PUPR bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) sepakat untuk melakukan percepatan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kawasan Transmigrasi.

Hal itu terungkap saat Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dan Dirjen P2MKT Kementerian DPDTT, M Nurdi melakukan audiensi percepatan pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi di Jakarta, Kamis (20/7).

Rido mengatakan, Kementerian PUPR dalam upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur menerapkan metode yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Ia menjelaskan, seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan dalam 35 WPS. **(ris/infoBPIW)**

Gelar Monev Lanjutan, BPIW Pacu Akselerasi Pengembangan Kota Baru Publik Maja



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) pembangunan kawasan Kota Baru

Publik Maja. Rapat monev yang dihadiri seluruh *stakeholder* tersebut digelar di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu, (19/7).

Turut hadir dalam rapat monev ini, antara lain Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Eko D. Heripoerwanto, Kabid Perencanaan dan Tata ruang BBPN IV, Beni Fariaty, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga, Akademisi ITB, M Jehansyah Siregar serta sejumlah perwakilan kementerian dan *stakeholder* terkait.

Rido Matari Ichwan mengatakan, monev dilakukan guna dapat mempercepat pengembangan Kawasan Kota Baru Publik Maja sesuai *Memorandum Of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani pada 27 Juni 2016 lalu.

Lebih lanjut, Rido menerangkan, dalam MOU tersebut Kementerian PUPR memiliki kewajiban membuat *masterplan* Kota Baru Publik Maja, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan akses Maja. "Termasuk pengadaan tanahnya bagi kepentingan umum untuk pembangunan jalan akses Maja," terangnya. **(ind/infoBPIW)**

Agustus 2017

Genjot Pengembangan Suramadu, Potensi Investasi Swasta Rp 53 Triliun



Kementerian PUPR terus memacu percepatan pengembangan wilayah di kawasan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Jawa Timur. Dalam mewujudkan percepatan pengembangan wilayah di kawasan tersebut, saat ini telah disiapkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dasar di dalam kawasan maupun wilayah sekitar kawasan tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat menjadi pembicara dalam "Suramadu *Investment Gathering*" yang mengambil tema "The Investment Opportunities of Suramadu Bridge Area" di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (31/7).

Hadir pembicara lain dalam kegiatan tersebut yakni, Himawan Hariyoga, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Bastary Pandji Indra, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, serta Agus Wahyudi, Plt Deputi Perencanaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Rido menjelaskan, Kementerian PUPR tengah menerapkan pola pengembangan berbasis kewilayahan yang disebut dengan istilah Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Seluruh wilayah di Indonesia telah terkelompokan ke dalam 35 WPS. Adapun untuk wilayah Suramadu masuk ke dalam WPS 13 meliputi Malang-Surabaya-Bangkalan," terang Rido. **(ris/infoBPIW)**

Hadirkan Direksi Lippo, BPIW Minta Mega Proyek Meikarta Dibangun Sesuai Aturan



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta jajaran Direksi Lippo Meikarta mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam rencana pembangunan mega proyek Kota Baru Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Kota Baru Meikarta di Kantor BPIW, Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (2/8).

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyatakan, BPIW merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas mengelola keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah di Tanah Air.

"Dalam rapat koordinasi ini, sengaja kami undang jajaran Direksi Meikarta yang akan mengembangkan Kota Baru Meikarta yang prediksi bakal menampung penghuni sekitar 1,5 juta jiwa pada tahun 2030," ungkap Rido. **(ris/infoBPIW)**

Miliki Peran Strategis, BPIW Perlu Terus Lakukan Publikasi

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan untuk terus gencar melakukan publikasi kinerjanya. Hal itu sebagai bentuk laporan kinerja kepada masyarakat luas.

Hal itu disampaikan Direktur Pengembangan Bisnis Media Indonesia, Shanty Nurpatricia didampingi Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Gaudensius serta jajarannya saat melakukan kunjungan ke Kantor BPIW Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (4/8) kemarin.

keras, inovatif serta bekerja cerdas, namun juga dituntut untuk lebih rajin lagi melakukan publikasi melalui pemberitaan dan bentuk lainnya sebagai laporan kinerja kepada publik.



la menilai, BPIW memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur PUPR di Indonesia. Sehingga, hal itu perlu lebih dipublik, agar masyarakat dapat lebih mengetahui hal-hal yang telah dilakukan BPIW. **(tim/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Lakukan Antisipasi Resiko dari Mega Proyek Infrastruktur



Untuk membangun infrastruktur pada periode 2015-2019, Kementerian PUPR akan membelanjakan Rp 530 triliun atau lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Pada Rencana Strategis atau Renstra periode tersebut, target pembangunan cukup besar seperti pembangunan 65 bendungan, 1.000 km jalan tol, 550 ribu unit pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan peningkatan akses terhadap air minum menjadi 100% tahun 2019.

Dengan besarnya target tersebut maka menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, Kementerian PUPR merencanakan dan melaksanakan mega proyek setiap tahun. Banyaknya mega proyek tersebut menurut Rido, Kementerian PUPR telah melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pembangunan dan menghindari resiko bencana yang akan timbul atau *avoiding disaster* dari mega proyek.

"Kita telah bekerja sama dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, untuk mengambil resiko, bila terjadi ketidakpastian hukum. Jadi ada resiko yang telah kita perhitungkan. Itu juga bagian dari upaya percepatan pembangunan infastruktur," ujar Rido saat menjadi salah satu pembicara pada seminar *Avoiding Disaster Of Mega Project*, di Jakarta, Senin (7/8).

Dalam merealisasikan mega proyek, menurut Rido, Kementerian PUPR melibatkan seluruh Unit Organisasi seperti Direktorat Jenderal, Pelaksana di daerah yaitu Balai Pelaksana Jalan Nasional dibantu oleh Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) terkait, Balai Wilayah Sungai dibantu oleh SNVT terkait, SNVT Cipta Karya, dan SNVT Perumahan. Jumlah SNVT tahun 2016 mencapai 782 SNVT di 34 provinsi. Sedangkan Balai berjumlah 54 SNVT. **(Hen/infoBPIW)**

Kembangkan Infrastruktur Terpadu, Kementerian PUPR Perkuat Kawasan Perbatasan



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pacu akselerasi pengembangan infrastruktur terpadu di kawasan perbatasan. Hal itu guna memperkuat wilayah perbatasan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan Nawacita dan Visi Misi Presiden.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, daratan yang merupakan wilayah perbatasan di Indonesia meliputi, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste. “Kemudian Provinsi Kalimantan Barat, Tengah dan Utara dengan Malaysia serta Provinsi Papua dengan Papua Nugini,” papar Rido saat berbicara dalam *Focus Group Discussion* (FGD) “Jelajah Tapal Batas 2017” di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (10/8).

Hadir sebagai pembicara lain, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah, Pelaksana Tugas Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Marvel Situmora, dan Walikota Tarakan, Sofian Raga. Diskusi ini juga diikuti perwakilan asosiasi pengusaha, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan kelompok masyarakat.

(ris/infoBPIW)

BPIW Susun Rapermen Anjungan Cerdas untuk Pembangunan dan Pengelolaan di 35 WPS

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas.

Hal itu diungkapkan dalam diskusi tentang Mekanisme Pembiayaan Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas yang dibuka oleh Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Wahyu Hendrastomo di Jakarta, Senin (21/8).

Kegiatan ini menghadirkan Sri Bagus Guritno, Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) serta perwakilan Direktorat



Barang Milik Negara (BMN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Purwito sebagai narasumber. Acara ini juga dihadiri perwakilan *Center for Sustainable Infrastructure* serta perwakilan unit organisasi di lingkungan BPIW.

Wahyu menyatakan, Rapermen yang dirancang tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pengelolaan Anjungan Cerdas di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

“Kegiatan ini juga ditujukan agar dapat menjangring informasi terkait sistem pengelolaan Anjungan Cerdas dengan biaya pembangunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Non APBN,” terang Wahyu. (Pona/Ris/infoBPIW)

Akselerasi Pengembangan KSPN Borobudur, Kementerian PUPR Bangun Konektivitas



Kementerian PUPR memastikan ambil bagian dalam memacu pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dengan melakukan akselerasi pengembangan konektivitas. Sehingga, akses menuju lokasi-lokasi wisata di kawasan Borobudur mudah dicapai dan dapat mampu mengundang banyak wisatawan mancanegara ataupun domestik.

“Pembangunan sistem konektivitas dalam mendukung pengembangan pariwisata di Borobudur dan sekitarnya, antara lain salah satunya melakukan pembangunan Jalan Tol Cilenyi-Garut-Tasikmalaya-Yogyakarta,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Badan Otoritas Pariwisata Borobudur di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman di Jakarta, Selasa (22/8).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan, Menteri Pariwisata, Arief Yahya,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro serta perwakilan kementerian terkait dan pemerintah daerah di lokasi KSPN Borobudur. **(ris/infoBPIW)**

Bangun Infrastruktur Krusial, Kementerian PUPR Siap Sukseskan IMF-WB AM 2018



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang krusial untuk menyukseskan *International Monetary Fund World Bank Annual Meeting 2018 (IMF-WB AM 2018)* atau Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 di Bali.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, saat ini hal yang paling krusial adalah pembangunan simpang Ngurah Rai karena bentuknya tak begitu memadai, sehingga perlu segera mendapat penanganan agar dapat mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

"Kita akan optimalkan beberapa pembangunan infrastruktur, seperti untuk *Underpass* di simpang Ngurah Rai," terang Rido saat Rapat Koordinasi Persiapan *Final International Monetary Fund World Bank Annual Meeting (IMF-WB) 2018* di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman di Jakarta, Rabu (24/8).

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan, hadir juga Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo perwakilan dari sejumlah kementerian dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. **(ris/infoBPIW)**

Percepat Pengembangan Kota Baru Publik Maja, BPIW Usulkan Bentuk Satgas Khusus

BPIW mengusulkan adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus Kota Baru Publik Maja. Pembentukan Satgas Khusus diyakini akan memacu percepatan pengembangan Kota Baru Publik Maja yang terintegrasi.

"Satgas Khusus diperlukan untuk mengelola pembangunan Kota Baru Publik Maja yang terintegrasi. Hadirnya Satgas Khusus akan memudahkan dalam mewujudkan rencana aksi yang telah disusun untuk Kota Baru Publik Maja," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat membuka Rapat Koordinasi Strategi



Percepatan Pengembangan Kota Baru Publik Maja di Kantor BPIW, Jakarta, Selasa (22/8).

Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga, Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Triono Junoasmono, Kabid pengembangan Kota Besar dan Kota Baru, Rudi Siahaan, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Real Estate Indonesia (REI), Hari Ganie, perwakilan dari seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, perwakilan Pemerintah Provinsi Banten serta Pemerintah Kabupaten Bogor. **(indi/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Dukung infrastruktur di Karangasem melalui WPS 15 Gilimanuk-Denpasar-Padangbay



BPIW Kementerian PUPR menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali di Kantor BPIW, Jakarta, Jumat siang (25/8). Dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Karangasem tersebut, Kementerian PUPR melalui BPIW akan mendorong pengembangan infrastruktur PUPR di Karangasem melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 15 Gilimanuk-Denpasar-Padangbay.

Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu mengatakan, Kementerian PUPR saat ini melakukan pengembangan infrastruktur dasar dengan menerapkan metode berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

"Seluruh wilayah yang ada di negeri ini, semuanya terkelompokan

dalam 35 WPS. Penerapan WPS ini dilakukan untuk mengidentifikasi wilayah strategis, yang dapat memberi efek berantai serta bangkitkan yang lebih baik terhadap wilayah-wilayah sekitarnya,” paparnya. Firman melanjutkan, dalam WPS itu terdapat sejumlah kawasan pengembangan dengan tema tertentu, seperti Kawasan Pertanian, Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kota Baru Publik Mandiri, dan lainnya. **(ris/infoBPIW)**

Pengembangan Infrastruktur PUPR di KSPN Terus Dipacu



BPIW Kementerian PUPR terus memacu akselerasi pengembangan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas. Dukungan Kementerian PUPR terhadap pengembangan KSPN prioritas, mulai dari pengembangan infrastruktur di kawasan menuju destinasi wisata serta di dalam kawasan destinasinya sendiri.

“Seperti memberikan dukungan terhadap sistem konektivitas (jalan,-red) demi dapat memberikan memudahkan akses menuju KSPN prioritas. Terwujudnya kemudahan akses akan menaikkan tingkat kunjungan wisatawan,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Forum Diskusi “Kebijakan Pengembangan Pariwisata: Upaya Pencapaian Target Wisman Sebanyak 20 Juta di Tahun 2019” di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Jakarta, Senin (29/8).

Hadir dalam diskusi tersebut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Manoarfa, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Dadang Rizki, serta perwakilan akademisi dan praktisi perencanaan. **(ris/infoBPIW)**

September 2017

Sukseskan IMF-WB AM 2018, Investasi Infrastruktur Krusial di Bali Rp 277 Miliar



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas krusial di Bali. Hal itu guna menyukseskan *International Monetary Fund World Bank Annual Meeting 2018* (IMF-WB AM 2018) atau Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia berlangsung pada November tahun depan. Demikian terungkap di sela-sela Rapat Koordinasi Persiapan IMF-WB AM 2018 yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (9/4).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu proyek krusial yang dipercepat penyelesaian dari jadwalnya adalah jalan *underpass* Bandara Ngurah Rai. Ia menjelaskan, saat ini progresnya lancar dalam pengendalian Kementerian PUPR.

Basuki berharap, tahun depan *underpass* tersebut ditargetkan selesai September, namun diharapkan ada percepatan sehingga selesai Juli atau Agustus dengan kualitas yang tetap terjamin kelas dunia.

“Selain *underpass*, ada tiga kegiatan proyek infrastruktur lainnya yang sedang dibangun, yakni pelebaran jalan di Jimbaran-Uluwatu, jalan di Klungkung-Panalokan serta arbitrase batas kota Singaraja menuju Bitani,” ungkap Basuki yang didampingi Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan serta Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto. **(ris/infoBPIW)**

Potret Pola Ideal Perkotaan di Tanah Air, BPIW Susun Buku SOIC 2017

BPIW Kementerian PUPR saat ini tengah menyusun sumber data kebijakan perkotaan, permukiman dan perumahan, serta infrastruktur dasar PUPR bagi para pemangku kebijakan di pusat maupun pemerintah daerah.

Demikian terungkap dalam diskusi mengenai Penyusunan Buku *The*



State of Indonesian Cities (SOIC) 2017: “Membangun Identitas Kota-Kota Indonesia” di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, buku yang targetnya dapat diluncurkan pada Hari Bakti (Harbak) PU ke-72 ini, diharapkan dapat memberikan pola ideal dari dinamika perkotaan yang terjadi pada kota-kota di Indonesia.

“Buku ini juga diharapkan dapat memfasilitasi *discourse* (wacana,-red) tentang perkembangan perkotaan Indonesia di kancah ilmu pengetahuan tingkat internasional,” ungkap Rido. **(ris/infoBPIW)**

BPIW Dorong Pengembangan Infrastruktur Pasuruan sebagai Kota Pusaka



Kementerian PUPR melalui BPIW mendorong akselerasi pengembangan infrastruktur di Kota Pasuruan sebagai dukungan dalam mewujudkan Kota Pusaka.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi kunjungan kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan yang dipimpin langsung Walikota Pasuruan, Setiyono di kantor BPIW, Jakarta, Rabu (13/9).

Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan mengatakan, banyak hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Pusaka. “Salah satunya Pemkot perlu menciptakan sesuatu yang khas. Keberadaan sesuatu yang menjadi ciri khas akan menjadikan daya tawar Kota Pasuruan dalam menarik minat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara,” jelas Rido.

Menurutnya, untuk lingkup nasional lokasi Kota Pasuruan merupakan wilayah yang strategis, yakni masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 14, Surabaya–Pasuruan–Banyuwangi. **(ris/infoBPIW)**

BPIW ‘Gandeng’ 6 Kepala Daerah dan Komisi V DPR RI Bahas Selingkar Wilis



Guna membahas rencana tindak lanjut pengembangan Selingkar Wilis, BPIW Kementerian PUPR menggelar Rapat Koordinasi Rencana Tindak Lanjut Kesepakatan Pengembangan Selingkar Wilis, di Madiun Jawa Timur, Senin (11/9). Dalam hal itu BPIW ‘menggandeng’ 6 Kepala Daerah dan 4 Anggota dari Komisi V DPR RI.

Enam Kepala Daerah yang hadir yakni Wakil Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak, Wakil Bupati Ponorogo, Soedjarno, Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno, dan Bupati Madiun, Muhtarom. Sementara Bupati Nganjuk diwakili Kepala Bappeda, Bambang Eko Suharto. Sebagaimana diketahui ada 6 daerah yang berada di kawasan Selingkar Wilis. Keenam daerah itu disebut Tunggal Rogo Mandiri (Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Madiun dan Kediri).

Rapat ini juga dihadiri 4 Anggota Komisi V DPR RI yakni, Budi Yuwono, Gatot Sudjito, Soehartono, dan Sadarestuwati. Saat memberikan paparannya, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, pengembangan Selingkar Wilis dilakukan dengan tujuan mewujudkan jejaring wisata pegunungan, pantai, panorama alam dan budaya yang bersinergi dengan pengembangan agribisnis dan industri serta pengolahan bahan mineral untuk membangkitkan daya tumbuh kembang kawasan secara inklusif dan berkelanjutan. **(Hen/ris/infobpiw)**

Kementerian PUPR Dorong Pemda Implementasikan New Urban Agenda

Kementerian PUPR mendorong pemerintah daerah (pemda) mengimplementasikan *New Urban Agenda* (NUA) melalui pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal dan pemberdayaan komunitas, terutama untuk daerah yang berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Demikian diungkapkan Kepala Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga dalam seminar nasional dengan tema “Implementasi *New Urban Agenda* dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Pemberdayaan Komunitas”. Kegiatan ini digelar Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa hari lalu.

Agusta mengatakan, prinsip agenda baru perkotaan salah satunya adalah pengembangan kawasan perkotaan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup dengan mendorong energi bersih dan pemanfaatan lahan dan sumber daya yang berkelanjutan, dan



melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dengan demikian pembangunan yang dilakukan diarahkan berbasis budaya lokal dan pemberdayaan komunitas.

Agusta menambahkan, kota memberikan pelayanan menuju kemakmuran dan peluang yang berkelanjutan. Termasuk, perencanaan dan pengelolaan tata ruang perkotaan serta membangun struktur pemerintahan perkotaan. **(Aji/infoBPIW)**

Pembangunan Anjungan Cerdas di Bali Sudah Mencapai 80 Persen



Kementerian PUPR saat ini tengah menyelesaikan pembangunan dua Anjungan Cerdas yakni yang berada di sekitar bendungan Tugu di Trenggalek, Jawa Timur dan di Rambut Siwi, Bali.

Sementara di Trenggalek terus dipercepat penyelesaiannya sesuai target, Anjungan Cerdas di Bali sudah mencapai 80 persen. Ditargetkan *rest area* non tol di Pulau Dewata tersebut dapat diselesaikan akhir tahun 2017. Hal ini merupakan sebuah prestasi, karena target awal (sesuai kontrak, red) untuk dua *rest area* yang berada di jalan nasional tersebut diselesaikan pada bulan Mei 2018. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan Anjungan Cerdas di Bali ini berada dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Gilimanuk–Denpasar–Padang Bai.

“Selain untuk memasarkan produk-produk unggulan lokal yang ada, masyarakat juga dapat berlomba menampilkan kreasi-kreasi seni, karena dalam anjungan cerdas ini terdapat panggung pertunjukan serta amphitheater yang dibangun khusus untuk menampilkan beragam kesenian khas Bali,” ungkap Rido. **(Hen/infoBPIW)**

Pengembangan Infrastruktur Jabar, Diarahkan untuk Keunggulan Kompetitif



Pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jawa Barat (Jabar) diarahkan pada memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan terhadap keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Ridho Matari Ichwan pada *Round Table Policy Dialogue* (RTPD) sebagai rangkaian acara Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (Rakorpusda) Jabar di Bandung, Selasa (26/9).

Rido melanjutkan, untuk mewujudkan pembangunan di Jabar tersebut dilakukan melalui peningkatan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. Selain itu, membangun sistem konektivitas nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan infrastruktur dasar permukiman serta keterpaduan infrastruktur wilayah dan pembinaan konstruksi nasional. “Termasuk fasilitasi perusahaan infrastruktur,” terangnya. **(ris/infoBPIW)**

Oktober 2017

Kementerian PUPR Pacu Pengembangan KSPN Danau Toba



Kementerian PUPR memacu pengembangan infrastruktur di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Danau Toba. Dukungan infrastruktur tersebut dilakukan terhadap kawasan menuju serta di dalam kawasan destinasi Danau Tobanya sendiri, mulai dari konektivitas jalan, peningkatan sumber daya air, keciptakaryaan

dan perumahan.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan kepada CNN Indonesia di kawasan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara, beberapa hari lalu.

Rido menjelaskan, pemerintah telah menargetkan kunjungan turis mancanegara mencapai 20 juta orang di tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memprioritaskan pengembangan 10 KSPN. KSPN Danau Toba merupakan salah satu yang akan lebih dipercepat pengembangannya. Peralnya, kawasan tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan angka kunjungan wisatawan, kesiapan masyarakat, dan juga dukungan dari pemerintah daerah setempat. **(ris/infoBPIW)**



diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat paparan “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional” dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Strategis PT Wijaya Karya Beton Tbk 2018-2022 di Bogor, Senin (9/10).

Menurutnya, pemerintah senantiasa mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk dapat berpartisipasi dan lebih maju dengan kualitasnya, sehingga kebutuhan konstruksi domestik akan dapat dipenuhi seutuhnya dari industri konstruksi nasional.

Ia menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pengembangan infrastruktur diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. **(ris/infoBPIW)**

DWP Kementerian PUPR Kampanye Bebas Kanker Serviks dan Payudara



Dalam rangka bulan peduli kanker yang jatuh pada bulan Oktober, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR melakukan penyuluhan “Deteksi Dini Mewujudkan Wanita Indonesia Bebas Kanker Serviks dan Payudara” di Aula dinas pengairan Aceh, Kota Banda Aceh, beberapa waktu lalu.

Penyuluhan kanker serviks ini merupakan salah satu program rencana kerja Ibu Negara, Iriana Jokowi untuk mengurangi angka kematian wanita yang disebabkan oleh penyakit tersebut. “Sejak tahun 2015, Ibu negara dan para istri menteri merasa sangat peduli dengan angka kematian wanita Indonesia yang disebabkan oleh kanker serviks dan payudara,” ungkap Wakil Ketua Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR, Yurida Rido saat membuka penyuluhan kanker mewakili Ibu Menteri PUPR, Kartika Nurani Hadimuljono.

Yurida mengatakan, setiap tahunnya ada 490 ribu perempuan terkena kanker serviks. “Dari angka tersebut sebanyak 80 persen penderita kanker serviks ada di negara berkembang, termasuk seperti Indonesia,” terangnya. **(ing/indi/infoBPIW)**

Menteri PUPR Tantang BPIW Makin Inovatif, Kreatif dan Luar Biasa



Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menantang BPIW Kementerian PUPR menghasilkan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah yang kreatif, inovatif dan luar biasa.

“BPIW mengemban tugas untuk menentukan arah ke depan Kementerian PUPR. Artinya, kalau perencanaan yang dihasilkan BPIW biasa-biasa saja, maka hasil dari pekerjaan Kementerian PUPR sudah dapat ditebak akan biasa saja. Sebaliknya, kalau perencanaan dari BPIW itu penuh pemikiran yang inovatif, kreatif dan luar biasa

Pembangunan Gencar, Peluang Badan Usaha Konstruksi Terbuka Lebar

Peluang badan usaha konstruksi nasional untuk naik kelas semakin terbuka lebar. Terlebih, saat ini pemerintah semakin gencar mengulirkan program pembangunan infrastruktur. Demikian

maka hasilnya dapat luar biasa juga,” ungkap Basuki dalam Rapat Koordinasi Rencana Kerja BPIW 2018 di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (12/10).

Untuk itu, Basuki berharap, jajaran BPIW dapat bekerja menciptakan perencanaan yang implementatif, kreatif, inovatif dan luar biasa. “Dengan begitu, jajaran BPIW itu perlu untuk berpikir lebih “gila” lagi, inovatif lagi, luar biasa lagi. Saya tak pernah melarang-larang BPIW untuk berpikir bebas dan “gila” dalam membuat perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah, namun jangan gila betulan saja,” ungkap Basuki yang diiringi gelak tawa hadirin. **(ris/infoBPIW)**

Dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, BPIW Lakukan Rapat Koordinasi



Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), BPIW Kementerian PUPR melakukan rapat koordinasi memastikan bahwa setiap pegawai di lingkungan BPIW memiliki pengetahuan dasar yang sama terkait reformasi birokrasi.

Demikian disampaikan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Hatorangan Napitupulu, saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPIW di Jakarta, Kamis (12/10).

Lebih lanjut Firman menyatakan, kegiatan ini merupakan sarana untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang capaian dan tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PUPR dan khususnya di BPIW. “Kegiatan ini juga untuk mencapai terlaksananya koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh Kemen. PANRB,” ujar Firman.

Dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan baik, ia berharap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi BPIW pada tahun ini dapat dilakukan dengan terencana dan terukur oleh setiap Kelompok Kerja dalam Tim Reformasi Birokrasi BPIW. **(Hen/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Tunjukkan Perannya dalam Membangun Infrastruktur di KSPN Danau Toba



Kementerian PUPR sudah menunjukkan perannya, terutama dalam pembangunan infrastruktur di kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono, pada Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT), di Medan, beberapa waktu yang lalu.

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan tersebut, Hadi turut hadir mewakili Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan yang berhalangan hadir.

Peran tersebut menurut Hadi ditunjukkan Kementerian PUPR dengan pembangunan infrastruktur di tahun 2017, seperti dibangunnya jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Bahkan pada 13 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan dua ruas tol Trans Sumatra yang dikerjakan Kementerian PUPR. Dua ruas tersebut adalah Tol Medan-Binjai seksi 2 dan 3 (Helvetia-Binjai) sepanjang 10,46 km, dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi 2-6 (Kualanamu-Sei Rampah) sepanjang 41,65 km. **(Hen/infobpiw)**

Rencana Kerja 2018, BPIW Targetkan Produk Lebih Kreatif dan Inovatif



BPIW Kementerian PUPR menargetkan Rencana Kerja Tahun 2018 yang akan digulirkan makin inovatif dan kreatif serta menjawab tantangan perkembangan zaman.

Hal itu ditegaskan Sekretaris BPIW, Kementerian PUPR, Firman H.

Napitupulu saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran BPIW Tahun Anggaran (TA) 2018 di Bandung, Senin, (16/10).

Menurutnya, ke depan program yang digulir BPIW mesti lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Pasalnya, saat ini telah menanti banyak pekerjaan besar Kementerian PUPR yang memerlukan dukungan canggih dari BPIW.

"Seperti mengimplementasikan *New Urban Agenda* (NUA,-red) dan *National Urban Development Program* dalam pembangunan di seluruh negeri. Termasuk, pelaksanaan event *World Urban Forum*," ungkap Firman. (ris/infoBPIW)

Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran BPIW Rp 248,3 M

Komisi V DPR RI menyetujui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 248,3 Miliar.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI mengenai Penetapan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018 yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H Sigit Siantomo di Jakarta, Rabu (18/10).

Sigit mengatakan, Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan BPIW Kementerian PUPR mengenai rincian program dan alokasi anggaran dalam RAPBN TA. 2018. "Pagu anggaran tersebut akan ditetapkan dalam rapat kerja mendatang," terang Sigit.

Ia menerangkan, pagu anggaran untuk Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian PUPR, Itjen Kementerian PUPR, Balitbang Kementerian PUPR, BPSDM Kementerian PUPR, Ditjen Bina Kontruksi serta BPIW tidak ada perubahan dari hasil rapat RDP pada 14 September 2017 lalu.

"Yakni pagu anggaran untuk Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian PUPR, sebesar Rp 600 Miliar, Itjen Kementerian PUPR sebesar Rp 104, 9 Miliar, Balitbang Kementerian PUPR sebesar Rp 611,9 Miliar, BPSDM Kementerian PUPR sebesar Rp 495 Miliar, Ditjen Bina Kontruksi sebesar Rp 338,7 Miliar serta BPIW sebesar Rp 248,3 miliar," paparnya.

Sebelumnya, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, BPIW memiliki peran strategis dalam pengembangan infrastruktur PUPR di tanah air. Dalam mekanisme di Kementerian PUPR, BPIW memiliki tugas menyusun perencanaan dan program, seperti membuat MPDP (*masterplan/development plan,-red*) untuk pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu.



Percepat Pengembangan Infrastruktur Kupang, Komisi V DPR RI Kunker ke NTT



Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali melakukan kunjungan kerja spesifik pada reses masa sidang I tahun 2017/2018. Kali ini, kunjungan kerja tersebut dilakukan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai dari Kamis (26/10) hingga Senin (30/11).

Pada hari pertama kunjungan kerja ini digelar juga "Forum Diskusi Infrastruktur Kota Kupang Bersama Komisi V DPR RI dan Mitra Kerja" di Kota Kupang, Kamis malam (26/10).

Diskusi yang dipimpin langsung Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis ini dihadiri juga anggota Komisi V DPR RI. Hadir juga perwakilan Kementerian PUPR yang mendampingi Kunker tersebut, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayant serta perwakilan kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI.

Djemy Francis mengatakan, forum diskusi ini diharapkan menjadi komunikasi yang efektif antara Komisi V DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam rangka membangun Kota Kupang.

Menurutnya, sebenarnya aspirasi dari para tokoh di Kota Kupang tidak pernah muluk. "Seperti aspirasi, Kota Kupang harus mampu membangun air bersih untuk masyarakat. Soalnya, saat ini penyediaan air bersih di Kota Kupang masih minim," jelasnya.

Ia melanjutkan, kemudian pembangunan drainase jalan yang berfungsi baik, penerangan jalan umum. "Aspirasinya masih pada tahap pembangunan infrastruktur dasar yang memadai bagi masyarakat Kupang," kata Fary.

Di tempat sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang segera dapat menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota.

Menurutnya, keberadaan Perda RTRW akan memudahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas infrastruktur PUPR di Kota Kupang. "Mulai dari jalan nasional, drainase, perumahan, taman kota dan lainnya," ungkap Rido.

Usai Aceh dan Manado, DWP Kementerian PUPR Lakukan Kampanye, Sosialisasi dan Pemeriksaan Kanker di Surabaya



Setelah melakukan kampanye, sosialisasi dan pemeriksaan kanker serviks dan payudara di Aceh dan Manado, kali ini Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR kembali melakukan kegiatan serupa di Aula Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XIII, Surabaya, Sabtu (28/10).

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Bulan Peduli Kanker Payudara Internasional yang jatuh pada bulan Oktober. Kampanye, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan yang mengambil tema "Deteksi Dini Mewujudkan Wanita Indonesia Bebas Kanker Serviks dan Payudara" ini merupakan inisiasi dari Ibu Negara, Iriana Joko Widodo beserta istri menteri yang tergabung dalam OASE Kabinet Kerja.

Wakil Ketua Bidang Sosial Budaya, DWP Kementerian PUPR, Yurida Rido menyatakan, kanker serviks dan payudara merupakan penyakit dengan angka kematian tertinggi bagi wanita di Indonesia. "490 ribu perempuan di dunia terkena kanker serviks setiap tahunnya. Dari angka tersebut (490 ribu,-red) sebanyak 80% penderitanya ada di negara berkembang, termasuk di Indonesia" ungkap Yurida Rido saat menyampaikan sambutan pada pembukaan acara mewakili Istri Menteri PUPR, Kartika Nurani Hadimuljono. **(ing/infoBPIW)**

Siapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Berketahanan terhadap Bencana, BPIW Kunjungi Kawasan Gunung Agung



Dalam rangka menyiapkan rencana pengembangan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana di Provinsi Bali, BPIW Kementerian PUPR melakukan peninjauan langsung ke kawasan

Gunung Agung, Minggu (30/10).

Peninjauan ini dipimpin langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan yang didampingi Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasi, P. Yudhantoro, Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida, I Ketut Jayada serta jajaran staf BPIW dan staf Balai Wilayah Sungai Bali Penida.

Rombongan dari Kementerian PUPR ini mengawali peninjauannya ke Pos Pemantau Gunung Agung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Usai mengunjungi pos pemantauan Gunung Agung, rombongan bergeser untuk memantau kesediaan air bersih dan tempat mandi cuci kakus di lokasi pengungsian Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. **(ris/indi/infoBPIW)**

November 2017

Tertarik Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur Perkotaan di Indonesia, IBRD Word Bank Kunjungi BPIW



International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD *Word Bank* tertarik melakukan peninjauan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur perkotaan di Indonesia. Demikian terungkap saat *Senior Urban Economist IBRD Word Bank*, Mark Robert didampingi stafnya mengunjungi BPIW Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (31/10).

Dalam pertemuan tersebut, Mark Robet mengatakan, pihaknya merasa tertarik melakukan kerja sama melakukan pengembangan infrastruktur perkotaan di Indonesia. "Pengembangan infrastruktur perkotaan di Indonesia peluangnya sangat menarik. Kami ingin terlibat turut bersama-sama mengembangkan berbagai infrastrukturnya," ujar Mark Robet.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, jajarannya mengapresiasi kunjungan jajaran *IBRD Word Bank* ke kantor BPIW. Ia berharap, pertemuan tersebut akan membawa manfaat besar bagi pengembangan infrastruktur di Indonesia. "Dalam rangka mengangkat kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia," terangnya. **(ris/infoBPIW)**

Perlu Kerja Sama yang Lebih Efektif Antar Insan BPIW



Setiap insan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR harus dapat bekerja sama dengan lebih efektif, sehingga tercipta koordinasi dan kolaborasi yang baik. Untuk itu dibutuhkan jiwa kepemimpinan dan kemampuan komunikasi yang baik dari setiap individu di badan yang mengurus perencanaan infrastruktur PUPR tersebut.

Demikian disampaikan Sekretaris BPIW, Firman Hatorangan Napitupulu mewakili Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat membuka kegiatan Peningkatan Kepemimpinan Insan BPIW, di Lembang, Bandung Barat, belum lama ini.

Ia juga menyatakan bahwa komunikasi yang baik diperlukan untuk mengatasi gap atau perbedaan keahlian dari masing-masing orang yang ada di BPIW. "Kita perlu memiliki integritas tinggi dan teamwork yang solid yang dapat bekerja sama secara efektif, sehingga menciptakan suasana kerja yang sinergi dan menjadi sebuah keluarga besar, yakni BPIW," tegas Firman.

Peningkatan kapasitas kepemimpinan menurut Firman diperlukan untuk menghadapi tantangan pekerjaan yang semakin berat. Apalagi kedepan, kemampuan para staf akan sangat ditentukan oleh kapasitas kemampuan yang tidak hanya terkait dengan kedisiplinan tetapi juga ada talenta-talenta khusus.

"Kapasitas disiplin ilmu akan sangat ditentukan oleh talenta-talenta khusus yang dimiliki setiap staf. Jadi tidak sekedar punya pendidikan tinggi. Kita perlu mempersiapkan hal itu. Untuk staf di BPIW, tidak hanya perlu memiliki kemampuan teknis tertentu, tetapi juga perlu manajemen di bidang pembangunan," ucap Firman.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat BPIW, Hasna Widiastuti dalam laporannya menyatakan dasar dari kegiatan ini adalah bahwa perlu adanya komunikasi yang efektif antar generasi dan komunikasi yang sinergis di lingkungan BPIW. Sedangkan fokus kegiatan ini adalah membangun komunikasi yang sinergis dan efektif serta memberikan pemahaman dalam hal perbedaan pola pikir maupun perspektif antar generasi yang dapat menjadi bekal dalam hal etika berorganisasi.

Hasna menuturkan, kegiatan yang dihadiri oleh Para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan BPIW serta seluruh staf Sekretariat BPIW ini berisi paparan mengenai 4 kepribadian dalam komunikasi agar dapat memahami seseorang. Paparan mengenai 4 kepribadian dalam komunikasi ini disampaikan Erwin Parengkuan dari Talk Inc. Dikatakan Erwin, terkait komunikasi setiap orang dibagi atas 4 kepribadian. Ia menyebutkan 4 kepribadian itu adalah Si Kuat, Gesit, Rinci, dan Damai. Untuk pribadi yang disebut Si Kuat menurut Erwin adalah orang terbuka dalam berbicara dan penampilannya lebih menonjol dari yang lain.

BPIW Luncurkan Buku Panduan Praktis Implementasi NUA dan SOIC 2017



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali meluncurkan buku. Kali ini, BPIW melakukan *softlaunching* (peluncuran,-red) Buku Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda/NUA*) dan Buku The State of Indonesian Cities (SOIC) 2017. Kegiatan tersebut digelar bersamaan dengan pembukaan Side Event dan Pameran Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2017 di lingkungan Kementerian PUPR, Senin (6/11). Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, data Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2014 menunjukkan sebanyak 54% penduduk dunia tinggal di kota. "Tren ini juga diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2035, yang diprediksi penghuni kota pada tahun tersebut mencapai 67%," papar Rido.

Rido menerangkan, Indonesia saat ini menempati posisi ke-5 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar setelah China, India, Amerika, dan Nigeria. Banyaknya penduduk, ujar Rido, secara langsung akan membentuk perkotaan menjadi pusat konsentrasi populasi penduduk, interaksi sosial dan budaya. (infoBPIW)

BPIW Siapkan Program Prioritas Nasional Pembangunan Infrastruktur 2019-2021

BPIW Kementerian PUPR memastikan perencanaan program prioritas nasional pembangunan infrastruktur PUPR jangka pendek tiga tahunan 2015-2018 telah terlaksana. Dengan begitu, saat ini BPIW mulai mempersiapkan perencanaan program pembangunan infrastruktur PUPR jangka pendek tiga tahunan 2019-2021 mendatang. Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat membuka "Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Pembangunan Infrastruktur PUPR" di Jakarta, Rabu (8/11).

Rido menjelaskan, rapat koordinasi tersebut digelar untuk melakukan sinkronisasi perencanaan dengan kementerian lain terkait program prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan dan program yang dihasilkan dapat bersinergi dan implementatif dalam menjawab



kebutuhan dukungan infrastruktur PUPR dalam program prioritas nasional. ([ris/infoBPIW](#))

Peluang Usaha Makin Terbuka, BUMN dan Swasta Ditantang Lebih Terlibat



Peluang investasi bagi sektor konstruksi di Tanah Air dipastikan semakin terbuka lebar. Pasalnya, pengembangan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah. Sehingga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha pada sektor konstruksi ditantang dapat makin terlibat.

"Pemerintah juga sangat membuka lebar berbagai peluang kerja sama pengembangan infrastruktur," ungkap Kepala BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan saat paparan "*Investment Opportunity in Public Work and Housing construction in 35 Strategic Development Region Across Indonesia*" di ajang Pameran Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia, Jakarta, Rabu (8/11).

Rido menerangkan, peluang kerja sama tersebut mulai dari kerja sama antar pemerintah, badan usaha dengan badan usaha, serta pemerintah dan badan usaha yang lebih dikenal *Public Private Partnership* (PPP). ([ris/infoBPIW](#))

Pembangunan Infrastruktur di Kota Baru Publik Maja Segera Dicanangkan



Kementerian PUPR akan melakukan pencanangan Kota Baru Publik Maja. Pencanaan kota baru publik tersebut rencananya akan dilakukan pada 18 November mendatang, bertempat di Areal Perumahan Citra Maja Raya, Lebak, Banten. Untuk mempersiapkan pencanangan tersebut, dilakukan rapat koordinasi di kantor BPIW Kementerian PUPR, (6/11).

Saat membuka rapat itu, Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan menjelaskan, tujuan dari pencanangan ini adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan juga untuk mempublikasikan kepada berbagai pihak bahwa Kementerian PUPR sudah mulai melakukan pembangunan di kawasan tersebut. Kota Baru Publik Maja merupakan salah satu arahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pengembangan kota baru yang berada di Provinsi Banten tersebut sudah dilakukan penandatanganan MoU oleh beberapa pihak yakni Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah sekitar Maja dan para pengembang, pada 27 Juni 2017 lalu. ([Shindie/hen/infobpiw](#))

BPIW Himpun Masukan Untuk Penyempurnaan Akhir dan Tindak Lanjut Pengembangan KPPN



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menggelar diskusi untuk mendapatkan masukan penyempurnaan akhir dan juga

untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Seminar Akhir Penyusunan Masterplan KPPN di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Sumbawa tersebut dilakukan belum lama ini di Jakarta.

Saat memberikan arahan dan kata sambutan, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga menyatakan bahwa pengembangan kawasan perdesaan, dilandasi oleh Nawacita poin ke-3 yang menggariskan pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran, dimana dilakukan perkuatan daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan kawasan perdesaan akan difokuskan pada 40 pusat-pusat pertumbuhan baru dengan kawasan perdesaan pada 60 kabupaten sebagai hinterlandnya yang dalam perkembangannya disebut sebagai KPPN. (Cindy/Hen/infobpiw)

Manajemen Perkotaan yang Inovatif dan Smart Solusi Permasalahan Kota



Indonesia masih menghadapi banyak “pekerjaan rumah” dalam sektor perkotaan. Salah satu permasalahan utama perkotaan adalah urbanisasi yang semakin pesat. Dalam 4 dekade terakhir penduduk perkotaan di Indonesia meningkat hingga 6 kali lipat dari 20 juta jiwa menjadi 120 juta jiwa atau sekitar 53% dari total populasi.

“Prinsipnya urbanisasi tidak perlu dihindari, bahkan perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia,” ungkap Kepala BPIW, Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan yang membacakan sambutan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada “Malam Penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City 2017” di Jakarta, Rabu malam (15/11).

Menurut Rido, kota sebagai pusat konsentrasi penduduk, interaksi sosial budaya, serta kegiatan ekonomi memang dituntut dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur, pelayanan dasar, kecukupan air, pangan, energi, perumahan layak huni, kesehatan, pekerjaan yang layak, ruang terbuka hijau, aman dari banjir, macet, bencana lain, serta masalah sosial kemasyarakatan. (ris/infoBPIW)

Untuk Mendukung Akses Menuju Kota Maja, Pembangunan Jalan Tol Dipercepat



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan percepatan pembangunan jalan tol Panimbang-Serang sepanjang 84 kilometer. Hal ini untuk mendukung pembangunan Kota Baru Maja sebagai kota Mandiri yang berada di sebelah barat Jakarta. “Kita sudah akan mulai dan kita percepat pembangunannya,” ujar Basuki saat meresmikan Kota Terpadu Citra Maja Raya di Lebak, Banten, Sabtu (18/11). Ditargetkan 2019 mendatang jalan tol ini sudah mulai beroperasi.

Tidak hanya itu, jalan Serpong-Balaraja yang dikembangkan swasta juga akan dibangun dan ditargetkan dapat selesai 2018-2019. “Jalan tol ini akan cepat sekali karena tanahnya merupakan tanah mereka sendiri,” tutur Basuki.

Dengan pembangunan jalan tol tersebut, menurut Menteri Basuki dapat lebih mempermudah akses menuju kota Maja. Hunian bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menurut Basuki juga menjadi perhatian instansinya. Kerja sama dengan swasta dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. “Luas lahan yang dikembangkan di Kota Maja ini mencapai 15 ribu hektar dan dapat menampung penduduk sebanyak 1,2 juta jiwa,” ungkap Basuki. (Hen/Dhi/infobpiw)

Peran BPIW Harus Diperkuat



Peran BPIW Kementerian PUPR harus diperkuat dalam konteks kebijakan pengembangan program infrastruktur PUPR. Demikian disampaikan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Hatorangan Napitupulu, disela-sela pembahasan persiapan pelaksanaan kegiatan swakelola dan pelelangan awal paket kontraktual di lingkungan BPIW Tahun 2018, di Bandung, Jumat (24/11).

Untuk memperkuat peran tersebut menurut Firman seluruh unit kerja di BPIW harus terus memiliki pola pikir yang sama terkait tugas dan fungsi BPIW. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditegaskan bahwa tugas Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Peraturan Menteri itu juga menyebutkan mengenai 6 fungsi dari BPIW. Keenam fungsi BPIW tersebut, salah satunya adalah penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Hen/infobpiw

Paduan Suara BPIW Raih Juara 3



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR berhasil meraih juara 3 lomba Paduan Suara di lingkungan Kementerian PUPR. Sementara Ditjen Cipta Karya meraih juara 1 dan Bina Konstruksi merah juara 2.

Kegiatan tersebut dibuka Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati, di auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (24/11). Saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam pembukaan kegiatan tersebut, Anita menyampaikan bahwa kegiatan lomba paduan suara ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam memperingati Hari Bakti PUPR yang diperingati pada tanggal 3 Desember mendatang.

Ia juga mengapresiasi tim paduan suara Kementerian PUPR yang telah meraih juara 2 untuk tingkat nasional antar kementerian. "Prestasi ini saya kira sebuah prestasi yang signifikan di Kementerian PUPR", tutur Anita. Beberapa pejabat turut hadir dalam kegiatan ini, seperti Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rido Matari Ichwan. Kehadirannya Rido untuk memberikan dukungan kepada tim paduan suara BPIW. (Dhi/infoBPIW)

BPIW Siapkan Pola Kerjasama Pengelolaan Anjungan Cerdas

Dalam rangka melakukan persiapan kerjasama pengelolaan Anjungan Cerdas, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar "Workshop Penyiapan Kerjasama Pengelolaan Anjungan Cerdas" di Badung, Provinsi Bali, Jumat, (24/11).



Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono saat menyampaikan arahan mengatakan, hadirnya workshop ini diharapkan memunculkan umpan balik dari peserta. Pasalnya, saat ini pembangunan Anjungan Cerdas sudah hampir selesai.

"Tepatnya, sekitar awal tahun depan (2018,-red) pembangunan Anjungan Cerdas telah selesai, sehingga dibutuhkan pengelolaan untuk keberlanjutannya," ungkap Hadi. (timBPIW)

Peringati Hari Bhakti PU ke-72, Kepala BPIW Tanam Pohon di Bendungan Palasari



Dalam rangka memperingati Hari Bhakti PU ke 72 tahun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar sejumlah kegiatan, diantaranya penanganan sampah dan penanaman pohon di Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS3R) Bantas Lestari Tabanan dan Bendungan Palasari, Kabupaten Jembrana, Bali, Senin-Selas (27-28/11).

Dua kegiatan ini merupakan rangkaian "Gerakan Peduli Mitigasi Bencana Tahun 2017" yang diinisiasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR. Turut hadir dalam penanaman pohon diantaranya Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan, Ketua Dharma Wanita BPIW Kementerian PUPR, Yurida Rido, Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, Ketut Jayadi, Ketua Panitia Pelaksana Acara Penghijauan Penanaman Pohon, Nengah Suardana. Dalam sambutannya, Rido mengatakan kegiatan ini dilakukan serentak di 34 provinsi yang puncaknya diselenggarakan di Oesapa dan Bendungan Raknamo, dengan tema "Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Situ, Danau, Embung, Waduk dan Juga Sumber Air Permukaan Lainnya" terangnya. (indi/ing/infoBPIW)

Desember 2017

Masyarakat Sabang Antusias Kunjungi Stan BPIW



Masyarakat Kota Sabang Provinsi Aceh, sangat antusias mengunjungi beberapa stan termasuk stan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) pada pameran yang bertajuk "Wonderful Sabang Marine Expo". Pameran yang berlangsung dari 1 hingga 5 Desember 2017 itu merupakan bagian dari Sail Sabang, dimana Sail Sabang digelar mulai 28 November hingga 5 Desember.

Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung, dimana hingga hari ini, Selasa 4 Desember, sudah ratusan orang mengunjungi stan BPIW. Kebanyakan pengunjung merupakan pelajar. Mereka sangat antusias untuk mendapatkan informasi dari petugas penjaga stan mengenai produk-produk yang dihasilkan BPIW.

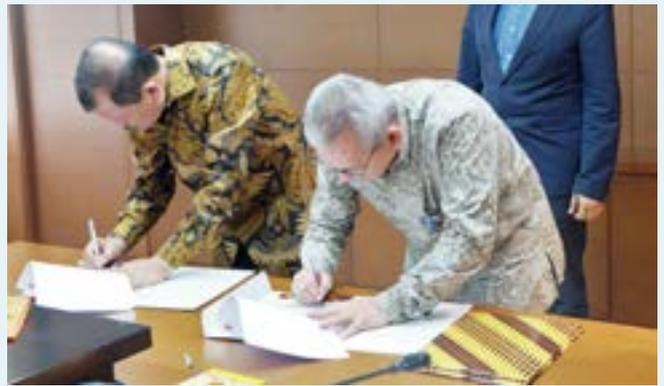
Pada kegiatan tersebut BPIW menampilkan rencana program infrastruktur PUPR tahun 2017 dan strategi pengembangan wilayah, terutama di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 1 yakni Sabang-Banda Aceh-Langsa. Penyelenggaraan Sail Sabang 2017 di Kota Sabang, Pulau Weh Ace ini, merupakan upaya Pemerintah menggalang keterpaduan dalam mendukung dan memperkenalkan pariwisata di Indonesia. (Hen/dhi/infobpiw)

BPIW Jalin Kerja Sama Dengan Dua Lembaga

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalin kerjasama dengan dua lembaga. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara BPIW dengan Yayasan Manusia Unggul Bawalaksana dan Universitas Darma Persada. Penandatanganan tersebut dilakukan di ruang rapat BPIW, Kamis (21/11).

Kerjasama ini terkait Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengembangan Infrastruktur PUPR dan juga Pengembangan Sistem Informasi dalam Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala BPIW Rido Matari Ichwan, Rektor Universitas Darma Persada Dadang Solihin, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Manusia Unggul Bawalaksana Marsekal Madya TNI (Purn) Dede Rusamsi. Penandatanganan ini menurut Rido merupakan kesepakatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam



pembangunan infrastruktur PUPR. "Dengan kesepakatan ini maka ada kesamaan pandangan bahwa kita memiliki kepentingan yang sama untuk mengembangkan infrastruktur Indonesia secara makro," ujar Rido. (Ind/infobpiw)

Penandatanganan Komitmen 10 Pemkab, Langkah Awal Pengembangan KPPN



Sebanyak 10 Pemerintah Kabupaten di Indonesia berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN). Komitmen itu ditunjukkan dengan penandatanganan komitmen pengembangan KPPN yang ada di daerahnya masing-masing, pada acara Sarasehan Nasional KPPN di Bali belum lama ini. Penandatanganan tersebut merupakan langkah awal implementasi dari masterplan dan Pra Desain untuk pengembangan KPPN tersebut. Kesepuluh pejabat yang menandatangani komitmen tersebut adalah Remigo Yolando Berutu Bupati Pakpak Bharat Sumatera Utara, Bupati Banjar Jawa Barat KH Khalilurrahman, Bupati Empat Lawang Sumatera Selatan Syahril Hanafiah, Bupati Morowali Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid, Bupati Luwu Timur Sulawesi Selatan Thorig Husler, dan Wakil Bupati Berau Kalimantan Timur Agus Tantomo. Sedangkan Kabupaten Toba Samosir, Mempawah, Dompu, dan Sidrap diwakili Sekretaris Daerah dan ada juga diwakili Bappedanya. Adapun tujuan dari penandatanganan tersebut adalah sebagai bentuk pemantapan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

Saat memimpin kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Rido Matari Ichwan mengatakan pengembangan perdesaan dilakukan salah satunya dengan pendekatan pengembangan KPPN yang menangani beberapa desa dari total 72.000 desa di Indonesia. Shindie/Hen/infobpiw

BPIW Bahas Rapermen Terkait Keterpaduan Perencanaan dan Program



Saat ini Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR tengah membahas secara tuntas Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Hatorangan Napitupulu Rapermen ini disusun dengan tujuan, agar proses penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu PUPR yang efektif melalui prosedur yang baku dan standar. "Maksud dari dibuatnya Rapermen ini adalah tersusunnya landasan hukum dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR yang baku dan standar," ujar Firman saat membuka kegiatan pembahasan Pedoman Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu tersebut di Batam beberapa hari yang lalu. Pembuatan Rapermen ini menurutnya sangat penting untuk menjaga keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. "Pembuatan pedoman ini didasari juga pada kebutuhan di lapangan," tutur Firman. **(Hen/infobpiw)**

Kepala BPIW Lantik 4 Pejabat Pengawas di Lingkungan BPIW



Penyegaran organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali dilakukan. Kali ini, Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan melantik 4 Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan BPIW yang digelar di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (19/12).

Pelantikan tersebut dilaksanakan mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPIW Nomor 42/KPTS/Kw/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan BPIW Kementerian PUPR.

Pejabat yang dilantik tersebut yakni, Rahindro S.Sos sebagai Kasubbag Hukum, Bagian Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasi, Sekretariat BPIW, Budi Rahmawati ST, MT sebagai Kasubbag Umum, Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Kemudian, Isni Yudithia S.Mb sebagai Kasubid Pemantauan dan Evaluasi Program II, Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR serta Dra Endah Trisuprasetyaning sebagai Kasubbag Umum, Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis. **(ris/infoBPIW)**

Website BPIW Terpilih Menjadi yang Terbaik di Kementerian PUPR



Website Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR terpilih menjadi website terbaik pada lomba konten dan tata kelola website Kementerian PUPR untuk kategori unit organisasi. Lomba tersebut digelar untuk memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum (Harbak PU) ke-72. Penghargaan itu diserahkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat upacara bendera dalam memperingati Harbak PU, Senin (4/12).

Dengan terpilih sebagai yang terbaik menurut Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan BPIW sudah benar dan disain websitenya menarik sehingga banyak orang mengunjungi website tersebut. Ia berharap prestasi ini dapat dipertahankan tahun depan.

Penghargaan website terbaik ini menurut Sekretaris BPIW, Firman Hatorangan Napitupulu menunjukkan bahwa pegawainya yang mengurus dan berkontribusi pada konten website merupakan orang-orang yang luar biasa. Dengan adanya prestasi ini menurut Firman membuktikan bahwa BPIW merupakan kumpulan orang-orang yang inovatif. Namun Firman tak ingin jumawa, baginya prestasi ini harus dipertahankan dan BPIW harus terus meningkatkan kinerjanya. **Hen/infobpiw**

11

CAPAIAN BPIW 2015-2017

BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

BPIW



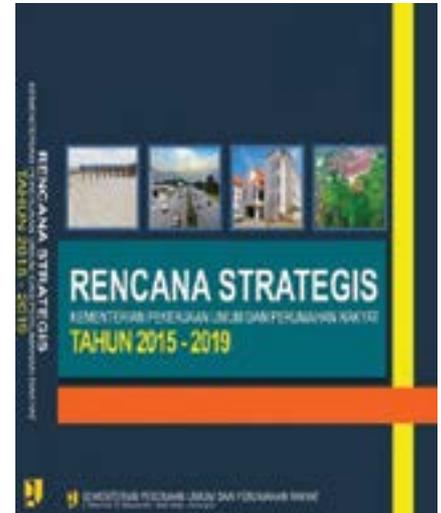
1

Dokumen Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 dan Review Renstra

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Renstra Kementerian PUPR) 2015-2019

Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 memuat sasaran pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019 yakni, mendukung konektivitas berupa pembangunan jalan tol 1.000 KM, pembangunan jalan nasional 2.650 KM, pembangunan jembatan 29.859 KM, peningkatan jalan nasional 3.073 KM, peningkatan jembatan 19.953 M, mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi berupa pembangunan 65 bendungan, 1 juta ha jaringan irigasi baru, 3.000 KM pengendali banjir, 306 pengendali lahar, 530 KM pengamanan pantai.

Untuk dukungan perumahan berupa pembangunan rumah khusus 50.000 unit, pembangunan rumah susun 550.000 unit, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya 250.000 unit dan peningkatan kualitas 1,5 juta unit serta dukungan keciptakarya berupa akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 ha serta akses sanitasi layak 100%.



2

7 Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR

Dokumen rencana induk disusun untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), penyediaan infrastruktur, dan pengembangan teknologi.

Pembagian 7 wilayah tersebut, Papua diproyeksikan untuk lumbung pangan, pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan. Maluku diproyeksikan untuk produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional, Nusa Tenggara diproyeksikan untuk pintu gerbang wisata ekologis, Sulawesi diproyeksikan untuk gerbang industri logistik, lumbung pangan nasional, industri perikanan dan wisata bahari, Kalimantan diproyeksikan untuk paru-paru dunia, lumbung energi nasional, Jawa-Bali diproyeksikan untuk lumbung pangan nasional dan pendorong sektor industri nasional dan Sumatera diproyeksikan untuk gerbang Indonesia dalam perdagangan Internasional, lumbung energi nasional.



3

35 MP & DP WPS

35 Master plan dan Development plan (MP/DP) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

Masterplan (MP) merupakan rencana induk pembangunan infrastruktur PUPR 10 tahun serta Developmentplan (DP) rencana pengembangan infrastruktur PUPR 5 tahun.

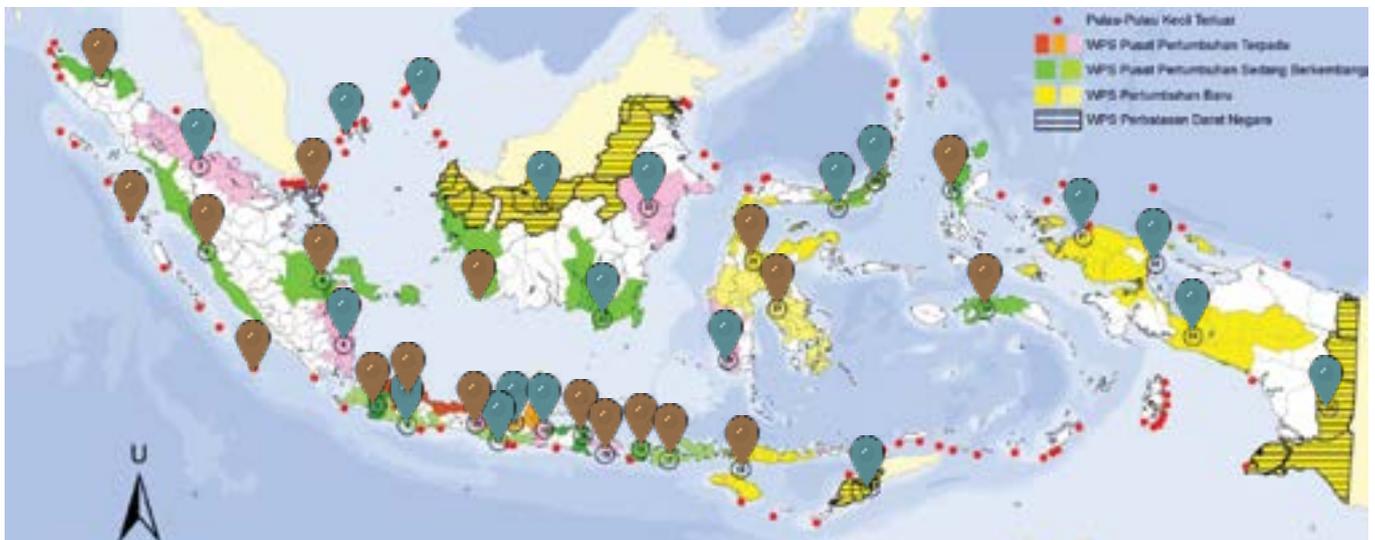
Esensi WPS meliputi pengembangan wilayah terpadu dengan "market driven", mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis, mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS serta mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

- Tahun2015
- Tahun2016
- ★ Tahun2017:

Rencana Aksi Implementasi Keterpaduan program dalam WPS(Penajaman MP & DP, diluar WPS Perbatasan (WPS 21,19, 34) dan WPS Pulau-pulau Kecil Terluar)

MP: Masterplan/Rencana induk pembangunan infrastruktur PUPR (10 tahun)

DP: Development plan/rencana pengembangan infrastruktur PUPR (5 tahun)



WPS 2 (Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru)	WPS 6 (Merak – Bakauheni- Bandar Lampung – Palembang – Tanjung Api-Api)	WPS 9 (TanjungLesung – Sukabumi – Pangandaran - Cilacap)	WPS 11 (Semarang - Surabaya)	WPS 12 (Yogyakarta – Prigi – Blitar - Malang)	WPS 13 (Malang – Surabaya – Bangkalan)
WPS 19 (Kupang - Atambua)	WPS 21 (Temajuk - Sebatik)	WPS 22 (Palangkaraya – Banjarmasin - Batulicin)	WPS 23 (Balikpapan – Samarinda - Maloy)	WPS 24 (Bitung – Manado – Amurang - Kotamobagu)	WPS 25 (Gorontalo - Kotamobagu)
WPS 28 (Makassar – Pare - pare - Mamuju)	WPS 31 (Sorong - Manokwari)	WPS 32 (Biak – Manokwari - Bintuni)	WPS 33 (Nabire – Enarotali - Wamena)	WPS 34 (Jayapura - Merauke)	WPS 35 (Natuna dan Anambas)
WPS 1 (Sabang – Banda Aceh - Langsa)	WPS 3 (Batam – Tanjung Pinang)	WPS 4 (Sibolga – Padang - Bengkulu)	WPS 5 (Jambi – Palembang – Pangkal Pinang – TanjungPandan)	WPS 7 (Jakarta – Bogor – Ciawi - Sukabumi)	WPS 8 (Jakarta – Cirebon - Semarang)
WPS 10 (Yogyakarta – Solo – Semarang)	WPS 14 (Surabaya – Pasuruan- Banyuwangi)	WPS 15 (Gilimanuk – Denpasar – Padang Bay)	WPS 16 (Tanjung – Mataram - Mandalika)	WPS 17 (Sumbawa Besar – Dompu - Bima)	WPS 18 (Waingapu – Labuan Bajo – Ende - Maumere)
WPS 20 (Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas)	WPS 26 (Palu - Banggai)	WPS 27 (Mamuju – Makale – Palopo – Kendari – Bau- bau – Wangi-wangi)	WPS 29 (Ternate – Sofifi – Daruba)	WPS 30 (Ambon – Masohi)	WPS 35 (Enggano dan Simuk)

4

14 Masterplan dan Development plan (MP/DP) Kawasan Strategis

Dokumen perencanaan sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pada 2015 tersusun MP/DP 4 kawasan strategis, antara lain MP/DP Kawasan Cikarang Bekasi Laut (CBL), Kawasan Danau Toba, Kawasan Food Estate Merauke dan MP/DP Kawasan Magelang–Muntilan–Borobudur.

Pada tahun 2016 tersusun MP/DP 8 Kawasan strategis Pariwisata Pantai/ Pegunungan/ Budaya, yakni MP/DP Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Wakatobi, Morotai, Raja Ampat, Brastagi, Bromo-Tengger-Semeru, dan MP/DP Toraja.

Pada tahun 2017 tersusun MP/DP 2 Kawasan kawasan strategis baru, yakni MP/DP Labuan Bajo dan MP/DP Patimban



KAWASAN STRATEGIS 2015

- Kaw.Cikarang Bekasi Laut (CBL)
- Kaw. Danau Toba
- Kaw. Food Estate Merauke
- Kaw. Magelang - Muntilan-Borobudur

KAWASAN STRATEGIS 2016

- Kaw. Strategis Pariwisata Pantai
 - Tanjung Kelayang •Morotai
 - Tanjung Lesung •Raja ampat
 - Wakatobi
- Kaw.Strategis Pegunungan &Budaya
 - Brastagi•Toraja
 - Bromo - Tengger - Semeru

KAWASAN STRATEGIS 2017

- Labuan Bajo
- Patimban

4

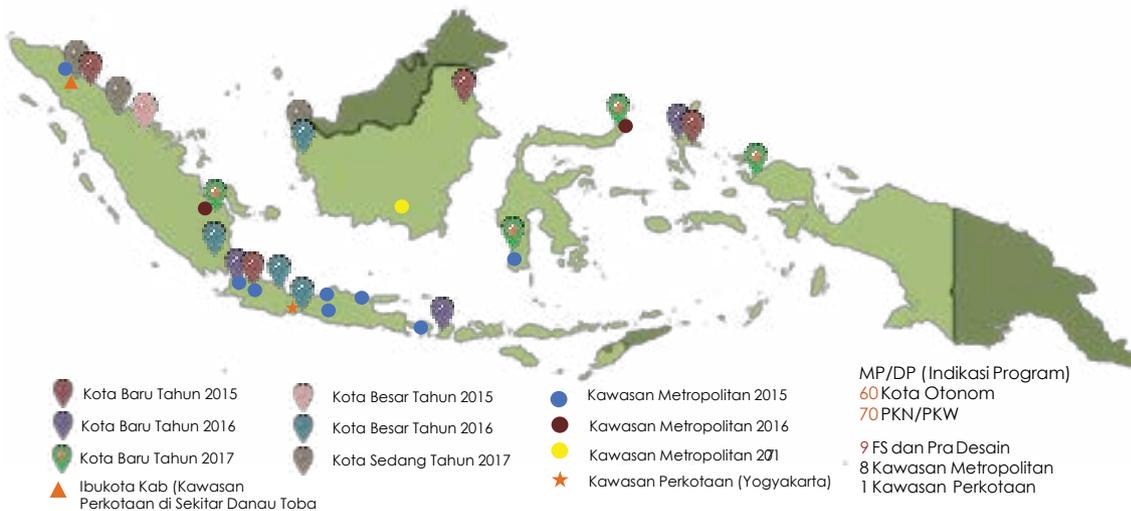
14 Masterplan dan Development plan (MP/DP) Kawasan Strategis



5

37 MP & DP Pengembangan Kawasan Perkotaan **9** FS & Pra Desain Kawasan Perkotaan **60** Kota Otonom **70** PKN/PKW

Dokumen perencanaan dan pemrograman sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan untuk mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan, membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan, mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana.



mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional.

Pada tahun 2015 tersusun MP/DP 4 Kota Baru (Sei Mangke, Kemayoran, Tanjung Selor, dan Sofifi), MP/DP 1 Kota Besar (Pekanbaru), MP/DP 7 Kawasan Metropolitan (Mebidangro, Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, Kedung Sepur, Gerbang Kertassula, Sarbagita, Mamminasata) dan MP/DP 1 Kawasan Perkotaan (Kawasan Perkotaan Yogyakarta)

Pada tahun 2016 tersusun MP/DP 4 Kota Baru (Kota Baru Maja, Bandar Kayangan, Pontianak dan Sofifi), 3 Kota Besar (Kota Bandar Lampung, Cirebon dan Cilacap), dan 2 Kawasan Metropolitan (Metropolitan Baru Palembang Raya dan Metropolitan Baru Bimindo).

Pada tahun 2017 tersusun MP/DP 4 Kota Baru (Sorong, Makassar, Manado, dan Palembang), 5 Kota Sedang (Dumai, Tebing Tinggi, Singkawang, Palangkaraya dan Mamuju), dan 1 Metropolitan Baru (Metropolitan Baru Banjar Bakula).



6

26 MP&DP
KPS

34 MP&DP
KPPN

26 Kawasan Perdesaan Strategis serta 34 Masterplan dan Development plan (MP/DP) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

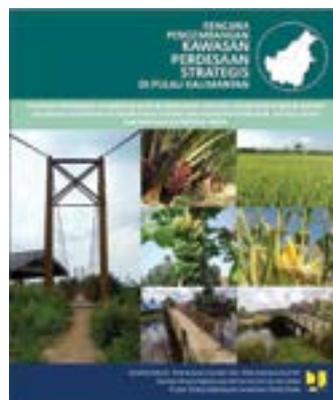
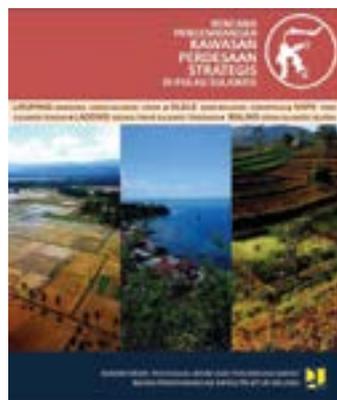
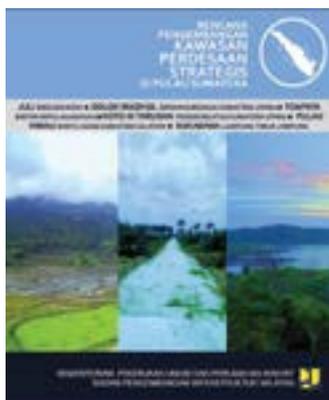
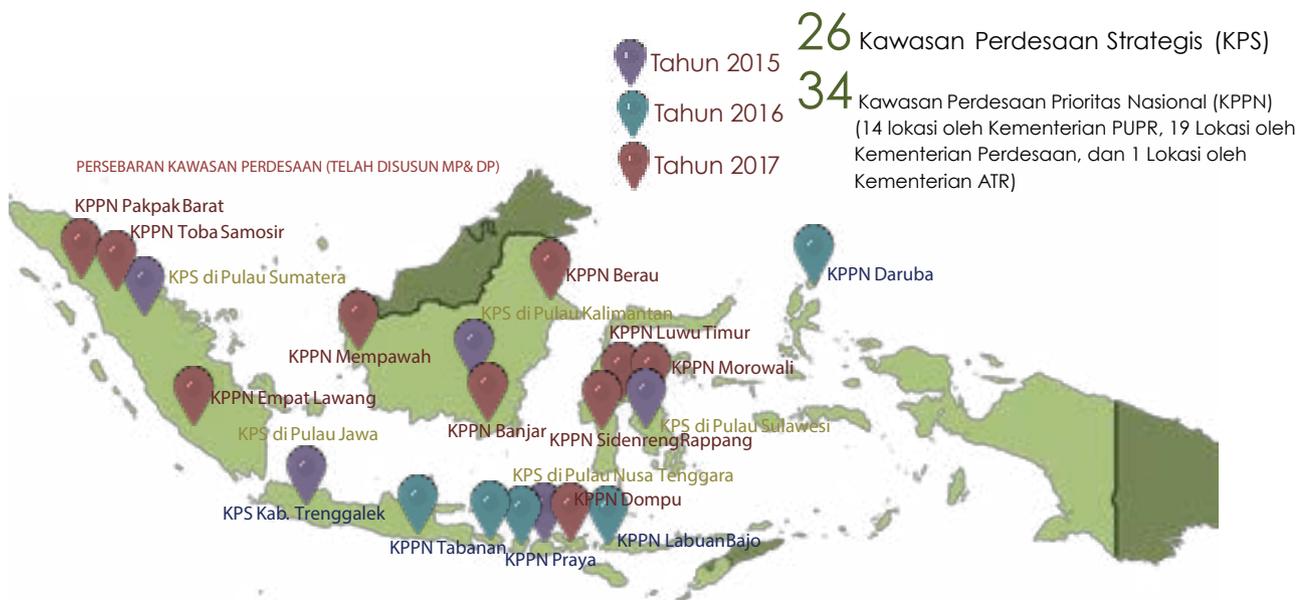
Dokumen perencanaan dan pemrograman sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan perdesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi desa-kota.

Pada tahun 2015 tersusun 26 MP/DP, yaitu 6 KPS di Pulau Sumatera (Kawasan Juli, Dolok Masihul, Toapaya, Mandeh, Pulau Rimau, Sukadana), MP/DP 5 KPS di Pulau Kalimantan (Kawasan Segedong, Mentarang, Kuala Kurun, Halong, Loa Kulu), MP/DP 4 KPS di Kepulauan Nusa Tenggara (Kawasan Sakra, Tambora, Kelimutu, Wini), MP/DP 5 KPS Pulau Sulawesi (Kawasan Likupang, Olele, Napu, Ladongi, Malino), MP/DP KPS Trenggalek dan MP/DP 5 Kawasan Periurban (Kawasan Lembang, Pleret, Tumpang, Kediri, Tampaksiring).

Pada tahun 2016 tersusun MP/DP 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dimana 4 diantaranya disusun oleh Kementerian PUPR, yakni Tabanan, Praya, Labuan Bajo, dan Daruba. Adapun sisanya ditangani oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Pada tahun 2017 tersusun MP/DP 20 KPPN dimana 10 diantaranya disusun oleh Kementerian PUPR, yaitu Kawasan Rasau Jaya, Mempawah, Kawasan Kolonedale, Luwu Timur, Kawasan Kolonedale, Morowali, Kawasan Sidikalang, Pakpak Bharat, Kawasan Sidikalang, Toba Samosir, Kawasan Rabo, Dompu, Kawasan Tanjung Redeb, Berau, Kawasan Baturaja, Empat Lawang, Kawasan Rabo, Sidenreng Rappang dan Kawasan Marabahan, Banjar.

Adapun sisanya ditangani ditangani oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/ BPN.



7

Dokumen keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program serta evaluasi keterpaduan **35 WPS** (Program jangka pendek 3 tahun, program tahunan dan evaluasi keterpaduan)

Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sinkronisasi Program 35 WPS (Program Jangka Pendek 3 Tahun, Program Tahunan dan Evaluasi Keterpaduan)

Dokumen perencanaan dan pemrograman untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur PUPR dalam waktu jangka pendek 3 tahunan serta program tahunan termasuk evaluasi ukuran keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR.



8

Kebutuhan dan Skema Pembiayaan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan

Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan

Dokumen kebutuhan pembiayaan perencanaan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur PUPR di 35 WPS dalam kurun waktu 2018-2022. Baik untuk pembangunan baru, rehabilitasi, serta pelebaran.

Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur PUPR 35 WPS (APBN dalam kurun waktu 2018-2022)

Total kebutuhan APBN 5 Tahun:

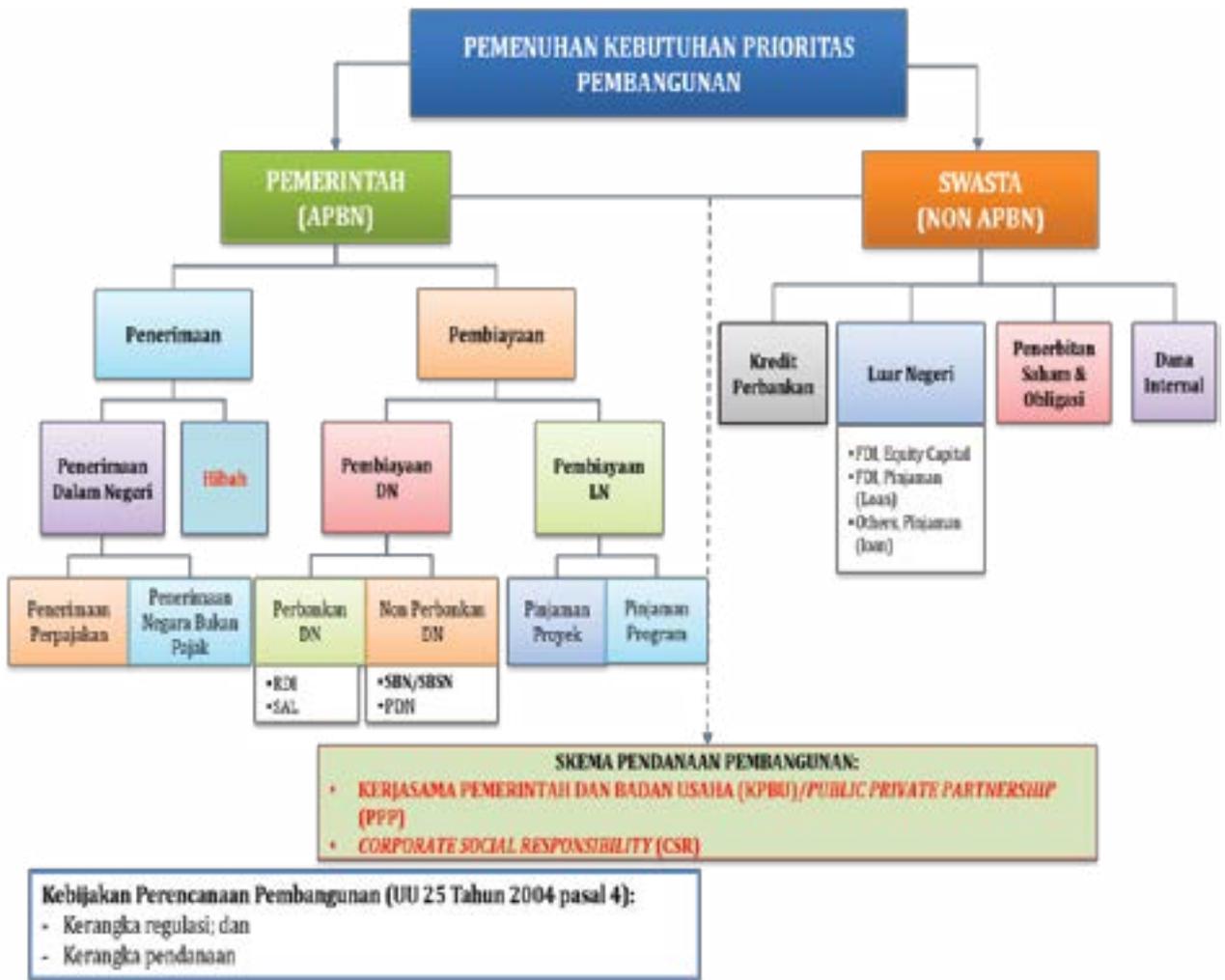
789,04 T

(Pembangunan baru, rehabilitasi dan pelebaran (mayor & signifikan))

* Perhitungan untuk WPS 35 Pulau- Pulau Kecil Terluar terbatas untuk 4 lokasi (Natuna, Anambas, Enggano, dan Simuk)

• Untuk kabupaten/ kota yang sama dalam deliniasi WPS yang berbeda, terdapat double perhitungan kebutuhan pembiayaan infrastruktur

+ Pemeliharaan Sektoral + Manajemen Pelaksanaan PUPR



9

3 Lokasi penyiapan proses Loan World Bank untuk Integrated Tourism Master Plan

Menyiapkan penyusunan dokumen perencanaan kawasan pariwisata berupa Integrated Tourism Master Plan untuk 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu KSPN Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, KSPN Borobudur di Provinsi Jawa Tengah dan KSPN Mandalika/Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai proses pencairan pinjaman dari Bank Dunia.



10

Inkubasi

BPIW telah mengembangkan kawasan inkubasi yang diharapkan menjadi pendorong wilayah sekitar sebagai trickling down effect. Hal tersebut dengan melakukan pengembangan Anjungan Cerdas percontohan di Rambut Siwi, Provinsi Bali dan Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

DEFINISI ANJUNGAN CERDAS

Anjungan Cerdas & Kumpulan bangunan di dalam satu kawasan terintegrasi yang terletak di pinggir jalan nasional, yang berfungsi untuk melayani pengguna jalan serta masyarakat lokal dengan fungsi informasi, promosi, edukasi, dan pariwisata; yang dilengkapi aktivitas penunjang dan dibangun oleh penyelenggara jalan.

ANJUNGAN CERDAS

- 1) Mampu mengintegrasikan berbagai dimensi infrastruktur baik multisektor maupun multipurpose;
- 2) Berfungsi sebagai "bridge" antara Gap Ekonomi di kawasan perkotaan dan non perkotaan dan mengurangi disparitas antar kawasan;
- 3) Sebagai media promosi, edukasi, Informasi (sosial, budaya), dan memiliki fasilitas penunjang seperti leisure activities;
- 4) Mengangkat identitas kawasan (terutama sebagai penghasil perikanan premium);
- 5) Mendorong entrepreneurship di suatu kawasan;
- 6) Sebagai stimulan yang difokuskan bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya

LOKASI PILOT PROJECT ANJUNGAN CERDAS

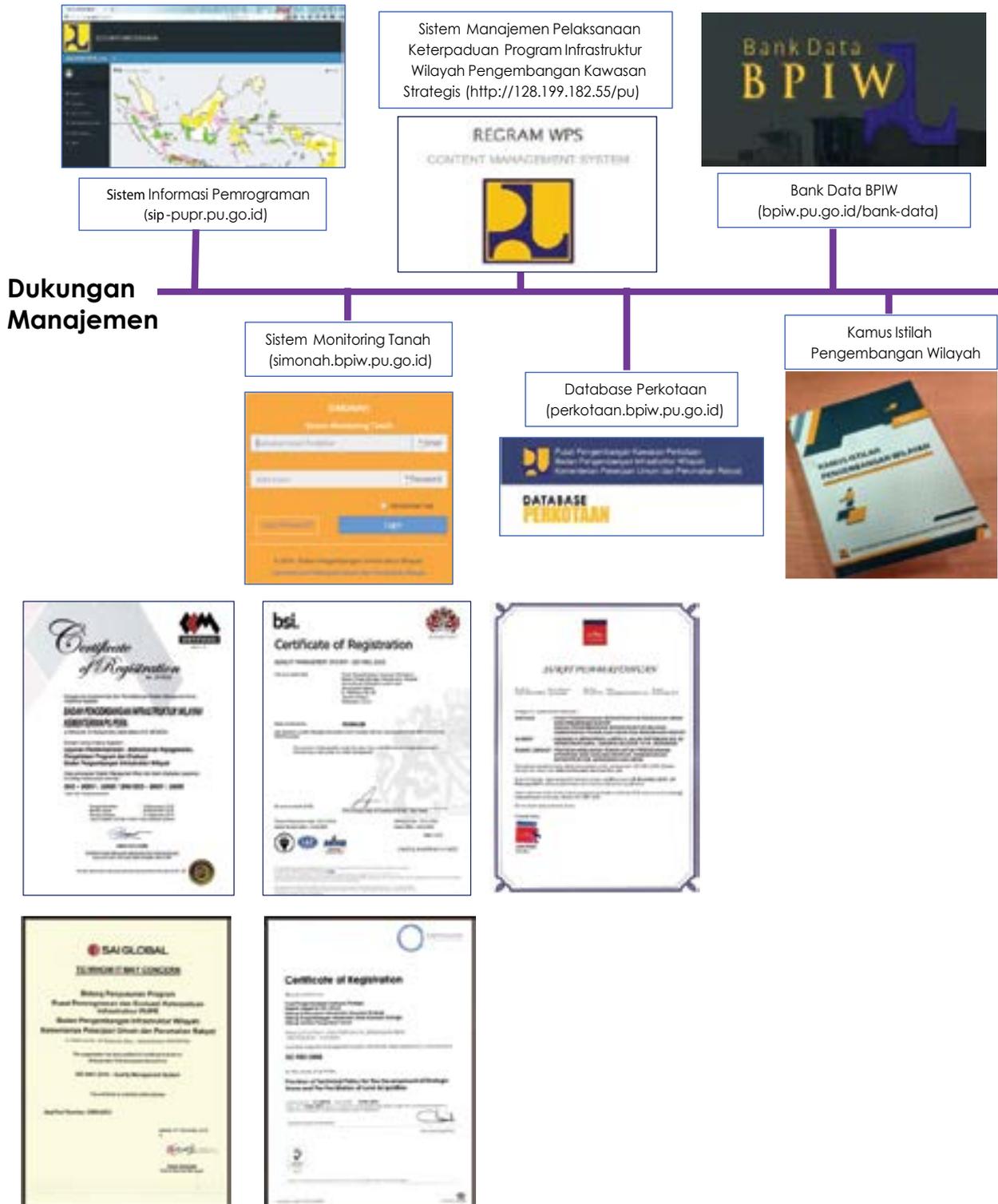
WPS 15 Gilimanuk, Denpasar, Padang Bay (Rambut Siwi)
 WPS 12 Yogyakarta - Prigi - Blitar - Malang (Bendungan Tugu)

FUNGSI ANJUNGAN CERDAS



11 Dukungan Manajemen

BPIW telah menerapkan dukungan sistem manajemen yang transparan, akuntabel, partisipatif dan profesional melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Seperti Sistem Manajemen Pelaksanaan Keterpaduan Program Infrastruktur Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis, Sistem Monitoring Tanah (Simonah), Database Perkotaan, Bank Data BPIW. Selain itu, menerbitkan Kamus Istilah Pengembangan Wilayah untuk menyamakan persepsi dalam mendefinisikan istilah pengembangan wilayah serta menghindari multitafsir dalam istilah-istilah pengembangan wilayah.



Upacara Bendera Memperingati Hari Bakti PU ke-72

Pada 4 Desember 2017 lalu, dilaksanakan upacara bendera memperingati Hari Bakti PU (Harbak PU) yang ke-72. Upacara bendera yang dipimpin Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono ini diwarnai dengan busana daerah dari seluruh di Indonesia yang dikenakan para peserta. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) juga turut serta dalam upacara tersebut, bahkan Sekretaris BPIW, Firman Hatorangan Napitupulu dipilih menjadi salah satu petugas upacara untuk membacakan UUD 1945. Berikut dokumentasi pada saat upacara berlangsung dan sesuai upacara.



Sekretaris BPIW Firman Hatorangan saat sedang membacakan UUD 45



Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sebagai inspektur upacara.



Barisan BPIW saat upacara berlangsung



Pimpinan dan staf BPIW berpose dengan pakaian adat usai upacara

Kepala BPIW Lantik 4 Pejabat Eselon IV BPIW

Penyegaran organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali dilakukan. Kali ini, Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan melantik 4 Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan BPIW yang digelar di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (19/12).



Kepala BPIW dan jajaran menyampaikan ucapan selamat



Rido Matari Ichwan menandatangani berita acara pengangkatan pejabat



Empat pejabat eselon IV saat diambil sumpah jabatan



Doa dipimpin rohaniwan sebelum kegiatan pelantikan selesai



Para eselon III yang menghadiri acara pelantikan

Kata Mereka Tentang Kiprah BPIW

Hingga penghujung tahun 2017, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkiprah dengan membuat perencanaan infrastruktur sektor PUPR. Beberapa kalangan pun angkat bicara mengenai hal tersebut pada rubrik Selayang Pandang ini. Berikut rangkumannya.

BPIW Harus Menjadi *Leader* dalam Mengembangkan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti

"BPIW mempunyai peran sangat penting karena perencanaan yang disusun akan menjadi arah pembangunan infrastruktur PUPR ke depan. BPIW memiliki tugas untuk memastikan infrastruktur yang dibangun terpadu dengan pembangunan kawasan, sehingga infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat akan dapat melayani aktifitas pusat pertumbuhan ekonomi, melayani produksi di kawasan industri, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup."

Harapan untuk peran BPIW dalam pengembangan perumahan sangat besar. Pertama, dukungan BPIW untuk Program Satu Juta Rumah. Pertumbuhan perumahan kluster kecil sangat pesat dalam dua tahun ini sebagai dampak dari PP no. 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). BPIW diharapkan dapat mengarahkan pembangunan infrastruktur PUPR untuk mendukung lokasi-lokasi perumahan tersebut sehingga semua terlayani dengan infrastruktur yang terpadu. Kedua, BPIW diharapkan juga dapat mendorong pembangunan infrastruktur untuk permukiman skala besar dan kota baru yang terintegrasi dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) PUPR.

Kondisi saat ini, banyak tumbuh kota baru yang lokasinya tidak berada dalam WPS, dan cenderung meningkatkan *urban sprawling* dan infrastruktur yang tidak efisien. *Masterplan* WPS perlu turunan *development plan* yang memperhatikan zonasi untuk perumahan MBR, dan dapat digunakan sebagai referensi pembangunan permukiman oleh Pemda dan swasta. Harapan ketiga, yakni arahan dan strategi untuk investasi pihak ketiga dalam pembangunan kawasan permukiman skala besar atau kota baru, yang memperhatikan dan berpihak pada kebutuhan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan.

Terakhir, saya sangat mengapresiasi dukungan BPIW untuk implementasi the *New Urban Agenda* (Agenda Baru Perkotaan). Terjemahan *State of Asia Pacific Cities* ke Bahasa Indonesia, penyusunan *State of Indonesian Cities* dan Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan. Publikasi ini sangat penting untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip Agenda Baru Perkotaan ke seluruh pemangku kepentingan. Salah satu komitmen Agenda Baru Perkotaan untuk mendukung pergeseran paradigma perkotaan yang sangat terkait peran BPIW adalah paragraph 15 yaitu:

Reinvigorating long-term and integrated urban and territorial planning and design in order to optimize the spatial dimension of the urban form and deliver the positive outcomes of urbanization atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah menguatkan perencanaan dan desain perkotaan dan teritorial jangka panjang dan terintegrasi, untuk mengoptimalkan dimensi spasial dari bentuk perkotaan dan memberikan hasil positif dari urbanisasi. (Hendra)



Keterpaduan Infrastruktur PUPR Harus Tetap Diperhatikan

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo

"BPIW punya peran yang sangat strategis dalam melakukan keterpaduan infrastruktur skala wilayah. Kita akan selalu melakukan koordinasi dalam rangka mengaitkan infrastruktur Cipta Karya dengan infrastruktur kePUPRan lainnya. Harapan saya tetaplh BPIW memperhatikan keterpaduan infrastruktur PUPR, terutama dalam mewujudkan kota yang lebih produktif". (Hendra)

Perencanaan BPIW Diharapkan Lebih Optimal

Wali Kota Pekanbaru, Firdaus

“Peran BPIW sangat baik, karena sudah sangat nyata dalam melakukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi kondisinya memang membangun sebuah kawasan tidak bisa berdiri sendiri, kita harus saling bersinergi. Dengan bersinergi perencanaan pembangunan infrastruktur dapat kita lakukan dengan baik. Dukungan dari berbagai kalangan seperti para pakar dari para akademisi, tokoh masyarakat, bahkan dari para ulama atau tokoh agama. Jadi umaro, umat dan ulama harus bekerja sama dgn baik untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Harapan saya perencanaan BPIW dapat lebih optimal dalam menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan jaringan komunikasi. Jadi infrastruktur dasar ini harus diselesaikan dengan segera sebagai bagian dari percepatan pembangunan. Akselerasi pembangunan dapat dilakukan bila pemerintah mengundang investor dan investor akan menanamka modalnya di suatu daerah, bila pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dasar, dapat membuat kondisi daerahnya aman dan nyaman untuk berinvestasi. Kedepan kerja sama BPIW dengan Pekanbaru dapat terus dijalankan dengan baik”.



Perlu Menselaraskan Konsep Perencanaan Pusat dan Daerah

Wali Kota Bogor, Bima Arya

“Tantangan terkait perencanaan ini menurut saya adalah bagaimana menselaraskan dua konsep perencanaan infrastruktur dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu untuk penganggarannya, kita juga butuh kepastian. Jadi kita di daerah butuh pembangunan infrastruktur, namun bila penganggaran dari pemerintah pusat tidak ada kepastiaan, maka akan mempengaruhi implementasinya. Paling tidak ada percepatan pembangunan infrastruktur. Jadi perlu jelas berapa anggarannya dan bagaimana proses penganggarannya yang sudah dijalankan, supaya kita bisa opsi-opsi lain bila terjadi masalah. Terkait hal itu, saya berharap kepada BPIW untuk lebih sering duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan rencana pembangunan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR di daerah”.

(Hendra)



Harus Dikaji Dampak Infrastruktur Bagi Masyarakat

Dewan Eksekutif Kemitraan Habitat, Nirwono Joga

“BPIW harus turun ke lapangan untuk mengkaji dampak infrastruktur bagi masyarakat sebelum dan sesudah infrastruktur PUPR itu dibangun. Ada 3 aspek yang perlu dikaji yaitu aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Sebagai contoh kajiannya seperti ini, bila infrastruktur jalan yang dalam kondisi baik, maka logistik lebih cepat dan hemat, masyarakat bertambah sejahtera dan kualitas lingkungan meningkat. Pada akhirnya perekonomian masyarakat suatu daerah meningkat.

BPIW harus menjadi bank data infrastruktur sektor PUPR, dimana data perencanaan pembangunan yang ada merupakan data yang akurat. Saya berharap BPIW ke depan dapat menjadi koordinator terhadap seluruh perencanaan program pembangunan infrastruktur yang dibangun secara terpadu, terutama melibatkan Ditjen di lingkungan Kementerian PUPR yakni Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Perumahan”.

(Indira)



Pembangunan Infrastruktur yang Handal, Dibutuhkan Perencanaan yang Optimal

Gubernur Banten, Wahidin Halim

Pembangunan infrastruktur sektor PUPR sangat penting, karena dapat membuka ruang bagi kegiatan masyarakat, misalnya petani bisa menjual produk pertaniannya. Pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Banten sangat diutamakan. Untuk mewujudkan pembangunan infrastuktur yang handal, maka dibutuhkan perencanaan yang optimal, sehingga dapat dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Untuk itu saya berharap perencanaan yang dilakukan Kementerian PUPR dapat berkoordinasi lebih baik lagi dengan pemerintah daerah.

(Hendra)



Harus Lebih Berani Menentukan Infrastruktur yang Akan Dikerjakan

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto

"BPIW harus lebih berani untuk menjadi *conductor* untuk sebuah orkestra seperti Kementerian PUPR. Apalagi BPIW telah diberi wewenang Pak Menteri. BPIW harus lebih berani menentukan infrastruktur yang akan dikerjakan di sebuah daerah. Sebagai contoh BPIW sudah mengeluarkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. BPIW harus berani 'memaksa' unit organisasi lain untuk mengisi bersama pembangunan infrastruktur di 35 WPS itu.

Kemudian BPIW juga harus berani menyampaikan kepada pemerintah daerah mengenai pembangunan infrastruktur yang akan dibangun di daerah sesuai dengan kondisi yang ada. BPIW juga harus memperhatikan masalah *border tourism* atau wisata di daerah perbatasan. Misalnya kita sudah membangun jembatan yang bagus di perbatasan, dan itu semestinya BPIW dapat mendorong itu menjadi daerah wisata di perbatasan.

BPIW telah melakukan sinkronisasi program dengan kementerian maupun lembaga lain yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, itu bagus, karena memang perlu duduk bersama antar kementerian maupun lembaga untuk membicarakan masalah sinkronisasi ini. Jadi BPIW membuat *grand design* perencanaan infrastruktur PUPR dengan yang dibuat kementerian maupun lembaga lain". (Hendra)



Program Infrastruktur yang Dibuat BPIW Perlu Didukung Kementerian Lain

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi

Banyak program infrastruktur PUPR yang dibuat BPIW, dan program-program perencanaan infrastruktur ini perlu didukung kementerian lain, termasuk Kementerian Perhubungan. Kita sangat senang, karena BPIW telah melakukan sinkronisasi program perencanaan. Kita akan mensinkronkan program-program yang ada di kementerian kita nya dengan program-program infrastruktur Kementerian PUPR.

Kalau program-program yang sudah disinkronkan sudah berjalan, maka akan menjadi sempurna. Program kerja sama ini harus menjadi atomosfir kita bersama, sehingga apa yang dikerjakan, kita dukung bersama-sama sepenuhnya". (Hendra)

BPIW Sebagai Perekat Satu Instansi dengan Instansi Lain

Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rahayu Sulistyorini

Saya melihat BPIW tidak sekedar lembaga yang melakukan perencanaan, tapi juga sebagai perekat dan koordinator yang menyambungkan satu instansi dengan instansi lain. Bahkan BPIW menjembatani kepentingan pembangunan infrastruktur PUPR antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten. Dengan demikian BPIW memadukan dan mensinkronkan pembangunan infrastruktur yang ada.

Tidak hanya itu, BPIW juga menjaga agar program pembangunan infrastruktur itu dapat berkelanjutan. Bagi kami, BPIW sebagai bapak dan teman, karena membangkitkan semangat untuk memajukan institut yang masih baru ini. Harapan saya, BPIW dapat menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur atau mensinergikan kawasan, baik yang masuk ke dalam Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS maupun diluar WPS. (Hendra)



Perlu Inisiatif Mencari Sumber Pendanaan Infrastruktur Diluar APBN

Pengajar di Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Yayat Supriatna

"Kajian yang dilakukan BPIW dalam membuat perencanaan infrastruktur, harus bersinergi dengan daerah untuk mendapatkan masukan-masukan. Beberapa usulan dari daerah tersebut perlu diimplementasikan. Dengan bersinergi, maka didapat data faktual mengenai kondisi infrastruktur yang akan diimplementasikan. Apalagi masyarakat sekarang bukan tipe yang menunggu. Masyarakat ingin pembangunan infrastruktur cepat direalisasikan.

BPIW juga harus punya inisiatif dalam mencari sumber pendanaan infrastruktur diluar APBN. Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan anggaran negara. Dengan mencari anggaran diluar APBN, ini berarti membuka peran serta swasta dalam membangun infrastruktur.

BPIW juga harus membuat infrastruktur yang lebih nyaman bagi masyarakat. BPIW juga harus bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi, sehingga kalangan akademisi dapat memberikan masukan berupa kajian akademis mengenai kondisi infrastruktur di suatu wilayah". (Indira)



Peran BPIW Sangat Vital

Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata, Hiramayah S. Thaib

Peran BPIW Kementerian PUPR sangat vital dalam membuat program pembangunan infrastruktur PUPR dalam mendukung terbangunnya aksesibilitas darat, terutama jalan raya, sehingga kualitas konektivitas kita mampu disejajarkan dengan destinasi wisata berkelas dunia lainnya.

Satu pekerjaan rumah yang sangat vital dan strategis adalah membuat *integrated tourism masterplan* yang menjadi acuan untuk perencanaan dan pembangunan seluruh aspek kawasan pariwisata. *Integrated tourism masterplan* tersebut, saat ini sedang dibuat BPIW bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan juga melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Pembuatan *Integrated tourism masterplan* tersebut nantinya diharapkan menjadi model untuk destinasi prioritas lainnya. (Daris)



Pembangunan Infrastruktur Diharapkan Mengikis Kesenjangan Kawasan

Wakil Ketua I Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Janthi T Hidayat

ASPI harus menjalin hubungan dengan BPIW, mengingat ASPI sebagai organisasi yang memberikan sumber daya manusia atau perencana yang akan menerapkan program-program pembangunan infrastruktur yang dibuat BPIW. Dengan bekal keilmuan para akademisi dari sekolah perencana yang di tanah air dapat memperkaya kajian perencanaan infrastruktur yang dilakukan BPIW, sehingga pembangunan infrastruktur yang dibangun dapat terus berjalan dengan baik.

Harapan saya BPIW dapat maju terus dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur di tanah air. Jadi infrastruktur yang dibangun tidak hanya infrastruktur jalan semata, tapi juga infrastruktur yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, seperti penyediaan air bersih. Pembangunan infrastruktur yang akan dibangun juga dapat mengikis kesenjangan kawasan perkotaan dan perdesaan. (Hendra)



Dilakukan Bersama akan Berjalan Efektif dan Cepat

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki

“Program pengembangan pemerintah diyakini akan berjalan efektif dan cepat, apabila dilakukan bersama-sama lintas sektor. Hal itupun berlaku untuk pengembangan infrastruktur, khususnya infrastruktur dalam pengembangan destinasi wisata. Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 program prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Untuk itu, koordinasi yang kerap digelar BPIW dengan lembaga dan kementerian terkait, khususnya Kemenpar sangat berguna untuk mensinergikan program dan perencanaan. Kemenpar sangat mengapresiasi keberadaan BPIW karena memudahkan dalam melakukan koordinasi untuk perencanaan dan pemrograman antar K/L untuk sektor infrastruktur. Semoga segala hal yang telah direncanakan terkait pengembangan infrastruktur di kawasan wisata dapat terwujud, agar kunjungan wisatawan dapat terus meningkat”. (Daris)



Perlu Konsisten Kawal Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Muhidin Mohamad Said

“BPIW diharapkan dapat mengawal perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah dengan konsisten, agar perencanaan yang telah disusun sedemikian rupa dapat terwujud. Keberadaan BPIW diharapkan mampu melakukan perencanaan yang mempercepat pembangunan. Termasuk, pengembangan infrastruktur yang efektif dan memiliki efek yang positif bagi masyarakat dan wilayah sekitar tempat dibangunnya infrastruktur. Saat ini kinerja BPIW seyogyanya perlu terus dikuatkan lagi, agar pengembangan infrastruktur di tanah air dapat semakin baik. Kemudian, pembangunan yang direncanakan BPIW dapat terwujud dengan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas”. (Daris)



Komisi V DPR RI Apresiasi Kinerja Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis

“Keberadaan BPIW di Kementerian PUPR menambah optimisme kita bahwa pengembangan infrastruktur di Indonesia akan semakin baik ke depannya. Sebagai pimpinan Komisi V DPR RI saya sangat mengapresiasi kinerja perencanaan pengembangan infrastruktur yang telah dilakukan BPIW. Perencanaannya sudah bagus karena ditunjang dengan kajian-kajian yang rasional, sehingga perencanaan yang telah ditetapkan agar terus dikawal, supaya semua hal yang telah direncanakan dapat terwujud sesuai rencana. Selain itu, perencanaan pengembangan infrastruktur yang dilakukan BPIW dapat menjawab tantangan yang ada”. (Daris)



*Segenap Pimpinan dan Pegawai
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mengucapkan:*

Selamat Tahun Baru 2018

SEM OGA SEL ALU SUKSES DAL AM BERKARYA



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**

